

**ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN KASUS KORUPSI
LUKAS ENEMBE PADA AKUN YOUTUBE KOMPAS TV**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

NADYA DWI HASTA

1901040045

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN KASUS KORUPSI LUKAS ENEMBE PADA AKUN YOUTUBE KOMPAS TV

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

NADYA DWI HASTA

19 0104 0045

Pembimbing:

1. **Dr. Masmuddin, M.Ag.**
2. **Jumriani, S.Sos., M.I.Kom.**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Dwi Hasta
NIM : 1901040045
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan saya dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Maret 2025
Yang membuat pernyataan



NADYA DWI HASTA
NIM 1901040045

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Korupsi Lukas Enembe pada Akun Youtube Kompas TV yang ditulis oleh *Nadya Dwi Hasta* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1901040045, mahasiswa Program Studi *Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah* untuk program sarjana *SI* Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Rabu, 13 Agustus 2025* bertepatan dengan *19 Shafar 1447 Hijriah* telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Sosial (S.Sos)*.

Palopo, 28 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Wahyuni Husain, S.Sos. M.I.Kom. | Penguji I | (.....) |
| 3. Ria Amelinda, S.I.Kom., M.I.Kom. | Penguji II | (.....) |
| 4. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 5. Jumriani, S. Sos., M.I.Kom. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah

Ketua Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP 19710512 199903 1 002



Jumriani, S.Sos., M.I.Kom.
NIP 19891020 201903 2 011

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Korupsi Lukas Enembe Pada Kompas Tv” setelah melalui proses yang panjang. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Hamzah, ibunda Itang, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara saudariku yang selama ini membantu, menyemangati dan mendoakanku, kepada keluarga besar yang selalu *mensupport*, memotivasi dan

mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak, Aamiin. Selain itu juga ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Rektor UIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III UIN Palopo masa jabatan 2023-2027.
2. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Palopo masa jabatan 2023-2027.
3. Jumriani, S.Sos., M.I.Kom. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Palopo beserta staf yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Dr. Masmuddin, M.Ag. selaku dosen Pembimbing I dan Jumriani, S.Sos., M.I.Kom. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. selaku dosen Penguji I dan Ria Amelinda, S.I.Kom., M.I.K om. selaku Penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. Selaku dosen penasehat akademik.
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada suami saya, Muh. Akbar Husaid yang selalu memberikan dukungan dan mendorong saya, dan juga menjadi *support system* untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi saya.

9. Putriwanti Marsuki, Miftahul Jannah Rustam, Helmy Syam, Musfira, Nur Afni, Yunda Dwi Pinasti dan Yunda Dwi Larasati yang selalu membantu, menjadi support system dan memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Diri saya sendiri Nadya Dwi Hasta, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang sedang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk kita sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Nadya. Adapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
11. Seluruh kawan-kawan seperjuangan, mahasiswa/i (khususnya kelas B), Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Palopo angkatan 2019, yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan senantiasa memberikan saran.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang setimpal. Semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.

Palopo, 8 Maret 2025



Nadya Dwi Hasta
NIM 1901040045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ.. ..أَ	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā'marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍahal-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبِّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سَيِّسِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*al-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarhal-Arba'īnal-Nawāwī

RisālahfiRi'āyahal-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'alinnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

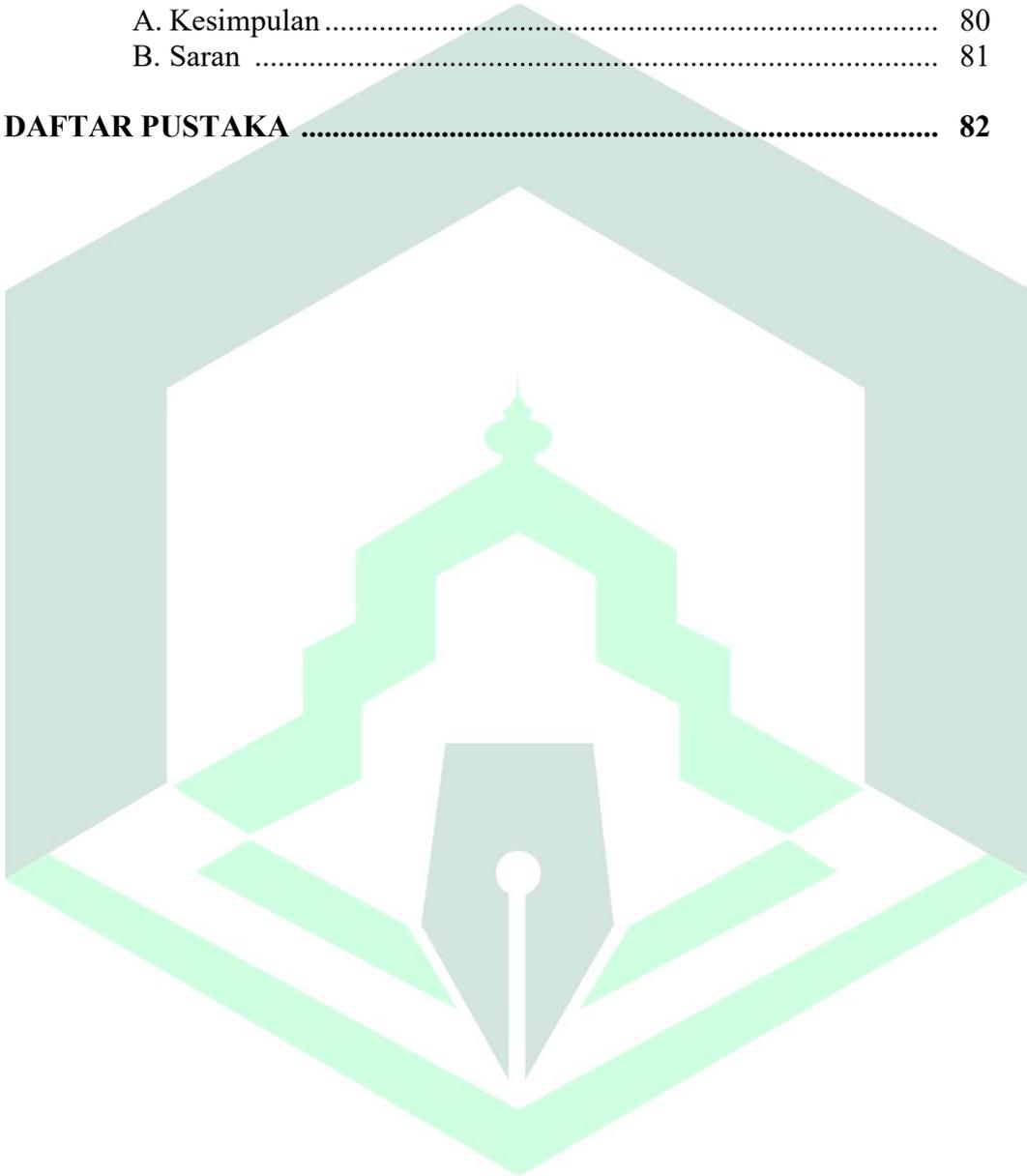
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. i	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw. i	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as i	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M i	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	=	Wafat Tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori	13
1. Analisis <i>Framing</i>	13
2. <i>Framing</i> Model Robert N Entman	16
3. Berita	18
4. Media Baru	23
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Definisi Istilah	32
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis data	34
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	36
A. Deskripsi Data	36
1. Profil Data Kompas TV	36
2. Profil Data Youtube	37
B. Pembahasan	41

1. Profil Lukas Enembe	41
2. Analisis <i>Framing</i> Robert N. Entman pada Kasus Korupsi Lukas Enembe di Akun Youtube Kompas TV	42
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Q.S al-Baqarah/2: 188	6
--	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep <i>Framing</i> Robert N Entman	17
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Logo Kompas TV.....	35
Gambar 4.2 Logo Kompas TV Pertama	36
Gambar 4.3 Logo Kompas TV Kedua	36
Gambar 4.4 Logo Kompas TV Ketiga	36
Gambar 4.5 Logo Youtube LLC	36
Gambar 4.6 Narasumber Bapak Jokowi	43
Gambar 4.7 Narasumber Agus Harimukti Yudhoyono.....	44
Gambar 4.8 keterangan 3 saksi sidang kasus korupsi Lukas Enembe	47
Gambar 4.9 kasus Lukas Enembe berakhir tapi negara bisa tuntutan ganti rugi ...	50
Gambar 4.10 Awal karir Lukas Enembe dan kasus hukumnya	51
Gambar 4.11 Lukas Enembe Meninggal	54

ABSTRAK

Nadya Dwi Hasta, 2025. “*Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Lukas Enembe pada Akun Youtube Kompas TV.*” Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Masmuddin dan Jumriani.

Skripsi ini membahas tentang analisis *framing* pemberitaan kasus korupsi Lukas Enembe pada akun youtube Kompas TV. Khususnya pemberitaan yang diterbitkan pada periode 9 Mei 2023 hingga 29 Desember 2023. Model analisis yang digunakan adalah teori Robert N. Entman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan ini menguraikan proses pembingkai berita oleh media terhadap empat tahap analisis *framing* yang diterapkan yaitu bagaimana masalah di definisikan, bagaimana masalah tersebut disajikan, penelitian moral terhadap masalah, dan bagaimana media mengakomodasi masalah. Penulis mengambil lima berita dari banyak nya viewers berita tersebut. Berita: (1) Dugaan Korupsi Lukas Enembe di Papua; (2) Keterangan Tiga Saksi Soal Aliran Dana Rp1 M di Sidang Kasus Korupsi Lukas Enembe; (3) KPK Sebut Kasus Lukas Enembe Berakhir Tapi Negara Bisa Tuntut Ganti Rugi; (4) Awal Karir Lukas Enembe dan Sekelumit Kasus Hukum Yang Menjeratnya; (5) Lukas Enembe Meninggal, KPK Sebut Pertanggung Jawaban Pidanya Berakhir. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Kompas TV tidak hanya berperan sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai agen yang mendorong reformasi dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan. Berita ini menunjukkan bahwa isi berita tersebut didasarkan pada data lapangan, fakta, dan informasi aktual. Analisis *framing* ini menunjukkan bagaimana media dapat memengaruhi opini publik dan menciptakan tekanan sosial yang mendukung penegakan keadilan.

Kata Kunci: Analisis *Framing*, Berita, Korupsi, Kompas TV

Diverifikasi oleh UPB



ABSTRACT

Nadya Dwi Hasta, 2025. *“Framing Analysis of the Lukas Enembe Corruption Case Coverage on Kompas TV’s YouTube Channel.”* Thesis of Islamic Communication and Broadcasting Study Program, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da’wah, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Masmuddin and Jumriani.

This thesis examines the framing analysis of news coverage on the Lukas Enembe corruption case as presented on Kompas TV’s YouTube channel, particularly between May 9, 2023, and December 29, 2023. The analysis model applied is Robert N. Entman’s framing theory. This qualitative research approach unpacks the news framing process through four analytical stages: defining problems, diagnosing causes, making moral evaluations, and suggesting remedies. The study analyzed five news reports with the highest number of viewers, namely: (1) Allegations of corruption involving Lukas Enembe in Papua; (2) Testimonies of three witnesses regarding a Rp1 billion fund flow in the trial; (3) KPK states Lukas Enembe’s case is closed but the state can still pursue restitution; (4) The early career of Lukas Enembe and the legal cases surrounding him; and (5) Lukas Enembe’s death and KPK’s statement on the end of criminal accountability. The findings indicate that Kompas TV acts not only as a source of information but also as an agent of reform and public awareness by emphasizing the importance of accountability in governance. The news content is presented based on field data, facts, and actual information. This framing analysis demonstrates how media can influence public opinion and generate social pressure that supports the enforcement of justice.

Keywords: Framing Analysis, News Coverage, Corruption, Kompas TV

Verified by UPB



الملخص

ناديا دوي هستا، ٢٠٢٥. "تحليل التأطير في تغطية قضية فساد لوكاس إنيمي في قناة يوتيوب كومباس تيفي"، رسالة جامعية، في شعبة الاتصال والنشر الإسلامي، كلية أصول الدين والآداب والدعوة، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. بإشراف: مسمودين وجمرياني.

تناول هذه الرسالة تحليل التأطير في تغطية قضية فساد لوكاس إنيمي على قناة يوتيوب كومباس تيفي، وخصوصًا الأخبار التي نُشرت في الفترة ما بين ٩ مايو ٢٠٢٣ إلى ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣. يعتمد التحليل على نظرية روبرت ن. إنتمن. وقد استخدم البحث المنهج الكيفي. بهذا المدخل تشرح عملية تأطير الأخبار من خلال أربع مراحل أساسية، وهي: كيفية تعريف المشكلة، كيفية عرضها، التقييم الأخلاقي للمشكلة، وكيفية اقتراح الحلول أو التوصيات. اعتمدت الباحثة على خمس أخبار بارزة من حيث عدد المشاهدات، وهي: الخبر الأول حول شبهة فساد لوكاس إنيمي في بابوا، الخبر الثاني شهادة ثلاثة شهود بخصوص تدفق أموال بقيمة مليار روبية في جلسة محاكمة فساد لوكاس إنيمي، الخبر الثالث تصريح هيئة مكافحة الفساد (KPK) بأن القضية انتهت لكن الدولة يمكنها المطالبة بالتعويض، الخبر الرابع عن بداية مسيرة لوكاس إنيمي وبعض قضاياها القانونية، والخبر الخامس وفاة لوكاس إنيمي وتصريح هيئة مكافحة الفساد بانتهاء مسؤوليته الجنائية. تُظهر نتائج التحليل أنّ كومباس تيفي لا تقوم فقط بدور ناقل للمعلومة، بل تؤدي كذلك دور وكيل للإصلاح وتعزيز وعي الجمهور بأهمية المساءلة في الحكم. كما تؤكد الأخبار أنّ مضمونها يستند إلى بيانات ميدانية وحقائق ومعلومات آنية. ويزر من خلال هذا التحليل أنّ الإعلام قادر على التأثير في الرأي العام وإيجاد ضغط اجتماعي يدعم تحقيق العدالة.

الكلمات المفتاحية: تحليل التأطير، الأخبار، الفساد، كومباس تيفي

تم التحقق من قبل وحدة تطوير اللغة



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini berlangsung sangat pesat, sehingga memudahkan kita dalam memperbarui informasi dari waktu ke waktu. Sejak akhir abad ke-20, jaringan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang signifikan. Perkembangan ini turut mendorong lahirnya fase baru dalam dunia media, yaitu kemunculan media digital. Media digital, atau yang sering disebut sebagai *media baru*, merupakan istilah yang digunakan untuk menandai hadirnya teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Media baru ini berbeda dari bentuk komunikasi tradisional seperti interaksi tatap muka. Ia menawarkan bentuk interaksi yang lebih dinamis dan personal, yang memungkinkan terciptanya hubungan yang terasa dekat secara emosional—sesuatu yang sebelumnya tidak dapat diwujudkan oleh media konvensional.

Menurut Denis Mc Quail, media baru adalah wadah semua pesan komunikasi bisa terpusat dan mudah untuk disalurkan menggunakan teknologi internet dan melibatkan audiens untuk meningkatkan proses interaksi dan komunikasi. Sedangkan menurut Arshano Sahar, *new media* merupakan kehadiran media yang semuanya serba digital dan dipengaruhi oleh internet akibat teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang. Dimana karakteristik media baru meliputi digitalisasi yaitu ciri dari *new media*. Hampir semua media mengutamakan bentuk digital, digitalisasi ini di manfaatkan sebagai kondisi kehidupan dalam budaya digital yang dianalogikan dengan modernitas dan post-

modernitas, dengan adanya media baru semua masyarakat dapat mengakses informasi yang mudah didapatkan dengan seketika melalui penyimpangan informasi gelombang ketiga.¹

Media baru juga disebut sebagai media yang belum mencapai kemajuan yang sama dalam jumlah penggunaannya. Mengembangkan informasi media baru dapat diandalkan di negara maju untuk mengungguli berbagai jenis media yang pada awalnya digunakan sebagai sumber referensi. Pada akhir tahun 1900-an, istilah "*New Media*" muncul untuk menggambarkan jenis media baru yang menggabungkan media internet dan media konvensional.²

Media baru meliputi berbagai macam jenis media sosial seperti youtube yang menjadi *platform* yang paling sering digunakan pengguna media sosial di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun. Persentase pengguna yang menggunakan youtube mencapai 88%. Media sosial ini paling sering diakses selanjutnya adalah WhatsApp sebesar 84%, dan instagram 79%.³ Media YouTube adalah layanan video berbagi yang disediakan oleh *Google* bagi para penggunanya untuk memuat, menonton dan berbagi klip video

¹ Romeltea, "*Media Baru Pengertian Dan Jenis-Jenisnya*", Mei 2 2019, <https://romeltea.com/media-baru-pengertian-dan-jenis-jenisnya/> Agustus 8 2023

² Dharlinda Suri, "Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi Dalam Perwujudan Pembangunan Nasional" *Komunikasi Pembangunan*, Vol.17 No.2, 2019, hlm.2, Agustus 8 2023
<http://repository.uinsu.ac.id/15999/2/BAB%20I%20%281%29.pdf>, Jurnal

³ Dwi Hadya Jayani, "*Media Sosial yang Paling Sering digunakan di Indonesia*," Februari 26 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-palingsering-digunakan-di-indonesia/> Agustus 9 2023

secara gratis. YouTube merupakan wujud dari pergeseran teknologi internet (*world wide web*) dari “*read only web*” ke “*read write web*”.⁴

Ketika internet hanya membuat sumber bacaan tersedia untuk penggunanya, internet memberi penggunanya kemampuan untuk membuat dan membagikan sumber bacaan kepada orang lain. YouTube sekarang menjadi situs paling populer dan ditonton oleh ribuan orang setiap hari karena pergeseran tersebut membuatnya menjadi salah satu media sosial yang praktis dan mudah diakses. Saat ini, jumlah pengguna YouTube meningkat sebesar 60% setiap tahun dan 40% setiap harinya.⁵

Media YouTube merupakan salah satu YouTube adalah situs web populer untuk berbagi (berbagi) video di mana orang dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Jenis video yang paling umum di YouTube adalah klip musik (video klip), film, dan televisi. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa kemampuan mesin pencari YouTube yang luar biasa membuatnya mudah menemukan video dalam berbagai cara. YouTube diluncurkan secara resmi pada Desember 2005 dan cepat menjadi populer.⁶

⁴ Andrea Wilson, “*YouTube in The*”,
”<http://repo.iaintulungagung.ac.id/17432/5/BAB%2011.pdf>/Agustus 9 2023

⁵ Lestari Renda, “*Penggunaan YouTube sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris*”. Makalah Seminar Nasional Kedua Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurnal pendidikan, hal. 609 /Agustus 9 2023

⁶ Yudhi Herwibowo, “*Youtube*” ,
<http://repo.iaintulungagung.ac.id/17432/5/BAB%2011.pdf>/Agustus 9 2023

Korupsi mengalami evolusi dari satu fase ke fase lainnya seiring perkembangan masyarakat dan organisasi negara. Korupsi sangat umum di hampir semua negara, walaupun dengan intensitas yang berbeda satu sama lain, sehingga banyak orang percaya bahwa pemerintahan akan runtuh jika korupsi tidak dihilangkan. Korupsi tidak hanya terjadi di negara demokrasi, tetapi juga di negara diktator militer. Semua sistem ekonomi, dari negara kapitalis terbuka seperti Amerika Serikat hingga ekonomi yang direncanakan secara terpusat seperti di bekas Negara Uni Soviet, telah melalui setiap tahapan perkembangan.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi seperti gurita yang mencengkeram berbagai aspek dalam sistem pemerintahan. Fenomena ini mencerminkan betapa parahnya kondisi tata kelola pemerintahan di negeri ini. Korupsi telah melahirkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya angka kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Pada akhirnya, penderitaan terbesar selalu dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di kelas bawah.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparatur pemerintahan, politisi, dan pengusaha sering kali menjadi *headline* dalam pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari patologi sosial dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan hukum, agama, serta perubahan dalam budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat.

Sebagai negara hukum, mereka pasti telah melakukan tindakan pencegahan dan represif. Namun, dalam hal ini, tidak peduli seberapa berat hukuman yang diberikan negara kepada pelaku tindak pidana korupsi oleh lembaga hukum, terlepas dari seberapa kuat upaya pencegahan, seperti seminar anti korupsi, dan lain-lain, yang dilakukan. Menghentikan korupsi tidak cukup untuk mengurangi dan menghentikannya.⁷

Namun, korupsi harus terus dilawan. Kita tidak boleh menyerah, berdiam diri, atau bahkan menghindari melakukan korupsi. Jihad adalah memerangi korupsi. Karena jihad tidak hanya melibatkan perang fisik melawan kelompok non-muslim, tetapi juga melibatkan semangat dan gagasan untuk memerangi kejahatan seperti korupsi. Sebagai dinullah, Islam, melalui al-Quran dan as-Sunnah, sumber utama ajaran umat Islam, dengan tegas mencegah dan melarang segala bentuk pelanggaran. Korupsi jika dicermati dalam istilah hukum pidana Islam belum dipahami sebuah jarimah, baik itu pada al-Quran maupun hadist. Hal penyebabnya merupakan bahwa pada dalam al-Quran dan Hadist tidak dijelaskan secara spesifik perihal korupsi. Tetapi disatu sisi ulama sepakat walaupun tidak diatur, tetapi korupsi ini mampu disamakan menggunakan perbuatan pencurian karena barang yang diambil bukan haknya melainkan milik orang lain atau Negara sebagai akibatnya menyebabkan mudharat dan kerugian terhadap maslahat umat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah ayat 188:

⁷ Malthuf Siroj, "Korupsi dalam Perpektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya" *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11.2 (2017), 293–312 <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.1038>>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya :

-“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan yang berbuat dosa), padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut menerangkan bahwa larangan mengambil harta orang lain secara bathil dan memakan harta benda manusia dengan dosa. Tetapi jauh dari itu apabila jiwa kita telah kita penuhi dengan keimanan, maka sudah tentu kita dapat menimbang dengan perasaan yang halus mana pencaharian yang halal dan mana yang bathil. Itulah sebabnya mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda saja, tetapi tujukanlah terlebih dahulu kepada yang memberikan anugrah harta itu, yaitu Allah SWT.⁸

Korupsi terjadi karena banyak faktor seperti gaya hidup konsumtif materialistis, sistem politik yang mahal, kepemimpinan yang lemah, kurangnya pendidikan agama dan moral, sistem sosial dan hukum yang mendukung praktik korupsi. Seperti halnya Lukas Enembe yang kembali menjadi topik pemberitaan karena tindakannya yang melanggar hukum saat masih menjabat sebagai gubernur Papua. Setelah banyak kasus yang menyeret namanya, publik kini terkejut dengan berita baru tentang perbuatannya. Lukas Enembe atas dugaan kasus gratifikasi dan suap. Salah

⁸ Hamka, "Tafsir AL-Azhar Juz I" I, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1965), h 155

satu korupsi yang dilakukan Lukas Enembe adalah penyelewengan dana untuk pekan olahraga nasional serta alokasi anggaran yang tidak adil untuk pimpinan pemerintah Provinsi Papua. Dilaporkan bahwa Lukas Enembe juga memiliki manajer untuk melakukan pencucian uang, dana yang disalahgunakan oleh Lukas Enembe digunakan untuk berobat di Singapura, seperti yang ditunjukkan oleh izin pengobatan yang diajukan Lukas kepada Kemendagri dari 31 Agustus hingga September 2022 lalu.

Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan duabelas aliran janggal yang dilakukan Lukas Enembe, masing-masing bernilai ratusan milyar rupiah. Beberapa aliran mencurigakan tersebut dilakukan dengan menyetorkan uang ke rumah judi dan juga melakukan transaksi dengan anaknya. Kemudian, PPTAK membekukan semua transaksi yang melibatkan atau melibatkan Lukas Enembe. Untuk menyelidiki kasus ini, PPTAK juga menggandeng sebelas lembaga keuangan, mulai dari asuransi hingga bank.⁹

Di tengah kasus Lukas Enembe yang merupakan terdakwa kasus suap dan gratifikasi. Lukas Enembe juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan sementara menjalani hukuman di rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan gubernur Papua ini

⁹ Willa Wahuni, "Fakta Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe," Januari 11 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fakta-kasus-korupsi-gubernur-papua-lukasenembe-lt63be7fd194e5a/> Agustus 8 2023

tutup usia di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Ia divonis gagal ginjal.

Salah satu media online yang memberikan informasi aktual tentang update pemberitaan kasus korupsi Lukas Enembe adalah media online youtube Kompas TV, penulis memilih media online ini sebagai objek penelitian karena *kompas.com* merupakan portal web ke 10 sebagai situs paling populer, dan memiliki jumlah video kurang lebih 320 ribu video dan *follwers* sebanyak 17,5 juta *subscriber*. Karena itu penulis ingin tahu, sebagai media terbesar di Indonesia bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Penulis menganalisa pemberitaan mengenai pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Lukas Enembe di Media online YouTube Kompas.Com dengan menggunakan pendekatan analisis *framing* model Robert N. Entman.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis memilih judul “Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus korupsi Lukas Enembe Pada Akun Youtube Kompas TV”.

B. Batasan masalah

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah agar penelitian ini tepat pada sasaran. Hal ini bertujuan agar hasil dari penelitian tersebut dapat dicapai secara maksimal. Batasan masalah ini sangat penting pada penelitian ini agar mudah dipahami dengan baik. Pada penelitian ini,

fokus kategori yang akan diteliti yaitu untuk menganalisis pembingkai kasus korupsi Lukas Enembe pada akun youtube Kompas TV.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisikan suatu masalah pokok yang menjadi pusat dalam penelitian. Meskipun di sisi lain banyak kendala-kendala yang perlu diatasi, adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

Bagaimana *framing* kasus korupsi Lukas Enembe di akun Youtube Kompas TV menggunakan teori Robert N. Entman

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan diatas. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

Untuk menganalisis bagaimana Kompas TV Membingkai kasus korupsi Lukas Enembe menggunakan teori Robert N. Entman.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mencapai kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

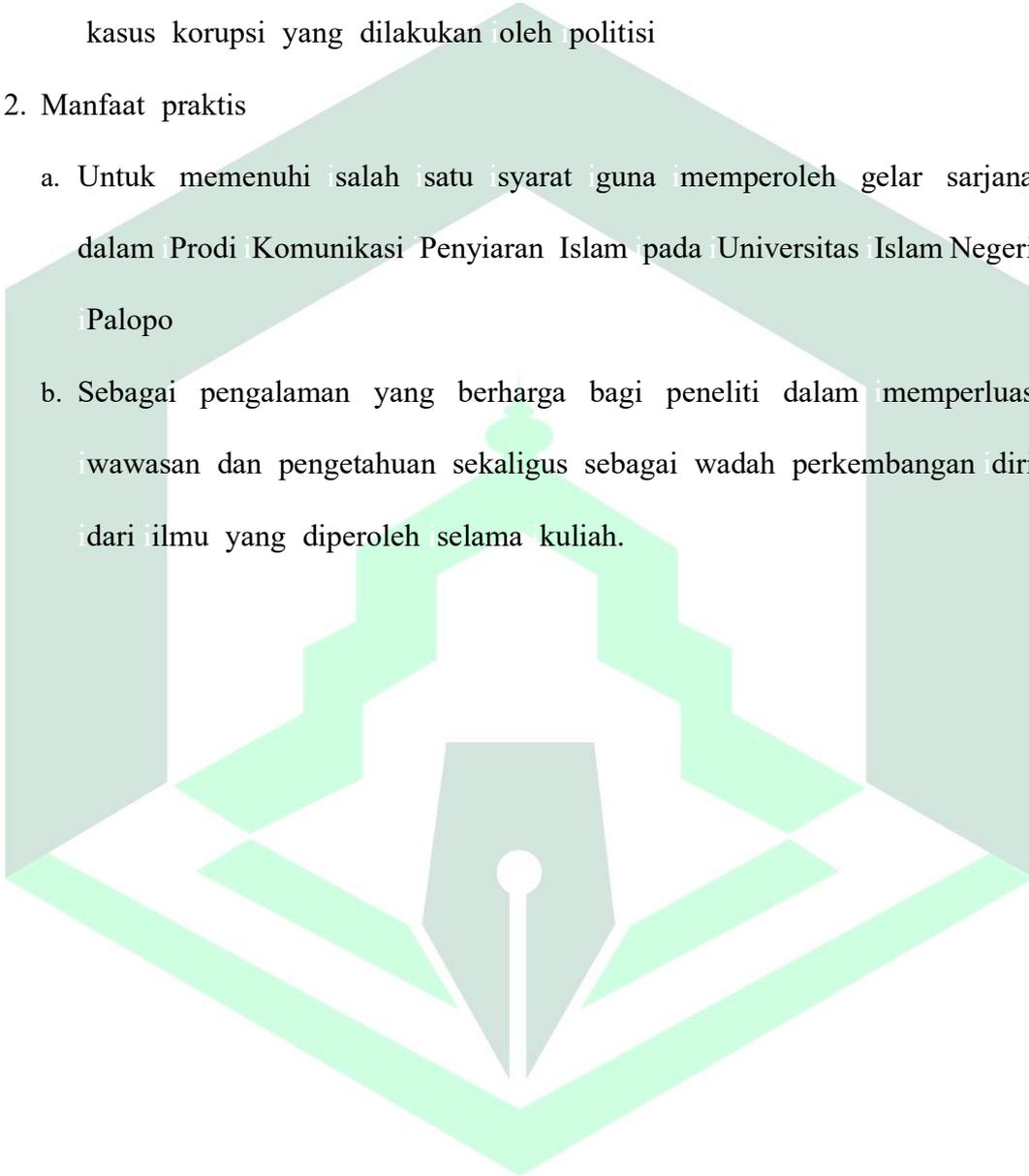
1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian *Framing* ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi berguna bagi pengembangan penelitian jurusan jurnalistik, khususnya bagi peneliti berbasis kualitatif yang berkaitan dengan media massa terutama penelitian menggunakan analisis *framing*.

- b. Untuk menambah khazanah ilmu komunikasi, khususnya yang berhubungan dengan fungsi media, dalam hal ini media cetak.
- c. Untuk menambah pengetahuan pembaca dalam pembingkai berita kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Prodi Komunikasi Penyiaran Islam pada Universitas Islam Negeri Palopo
- b. Sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan pengetahuan sekaligus sebagai wadah perkembangan diri dari ilmu yang diperoleh selama kuliah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti beberapa di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Feronita Nuraini Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul “Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Korupsi Setya Novanto di Media Online Kompas.Com”. Tahun 2019. Penulis menggunakan pendekatan induktif sebagai metode penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini. Selanjutnya teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi dokumenter dan studi kepustakaan. Pada penelitian ini, peneliti memberikan simpulan bahwa *framing* berita terlihat dari perspektif sosiologis dan psikologis, karena ada adegan menangis dalam drama Setya Novanto. Pembaca harus membaca berita karena alasan menangis tidak dijelaskan. Adegan menangis ini dibuat dengan tujuan meminta belas kasihan agar kasusnya dapat dikurangi atau bahkan dihentikan karena kesehatannya. Sisi memohon Setya Novanto terkait dengan sisi psikologisnya, dan aspek sosiologinya adalah meminta belas kasihan atas kecelakaan yang menimpanya.¹⁰

¹⁰ Feronita Nuraini, “Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Korupsi Setya Novanto di Media Online Kompas Com”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan skripsi ini adalah “subjek kajian” penelitian pertama membahas tentang pemberitaan kasus korupsi di media online Kompas.Com sementara pada skripsi ini membahas tentang pemberitaan kasus korupsi pada akun YouTube Kompas TV, perbedaan kedua “objek yang berbeda”, penelitian pertama meneliti kasus korupsi Setya Novanto sementara pada skripsi ini meneliti kasus korupsi Lukas Enembe, ketiga “jenis penelitian”, penelitian pertama menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti pemberitaan kasus korupsi pada media dan sama-sama menggunakan analisis *framing*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zawawi Zulfitra Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Putra Batam dengan judul “Analisis *Framing* Pemberitaan Korupsi Petinggi Organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Media Tempo.Co dan Liputan 6.Com” Tahun 2023. Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selanjutnya teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini memberikan simpulan bahwa hasil proyek konstruksi Liputan6.Com atas kasus uang donasi yang hilang tidak hanya berorientasi pada peristiwa, tetapi juga sering menggunakan statistik data-data sebagai konteks sejarah sosial dan sering menghubungkan satu

informasi dengan informasi lainnya di jalannya proyek.¹¹ Guna membangun opini publik tentang peran para tersangka dalam kasus penggalangan dana ACT, Konstruksi pemberitaan Tempo.Co membahas kasus penggalangan dana sesuai keinginan pribadi petinggi ACT.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan skripsi ini adalah “subjek kajian” penelitian pertama membahas tentang pemberitaan korupsi di media i Tempo.Co dan Liputan6.Com sementara pada skripsi ini membahas tentang pemberitaan kasus korupsi pada akun i YouTube i Kompas TV, perbedaan kedua “objek yang berbeda”, penelitian pertama meneliti kasus korupsi Petinggi Organisasi Aksi i Cepat i Tanggap (ACT) sementara pada skripsi ini meneliti kasus korupsi Lukas i Enembe. Adapun persamaanya yaitu sama-sama meneliti pemberitaan i kasus korupsi pada media, jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama menggunakan analisis *framing* Robert Entman.

B. Deskripsi Teori

1. Analisis *Framing*

Framing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pembingkaiian”. Analisis *Framing* adalah salah satu cara analisis media seperti halnya analisis isi dan analisis semiotic. Secara sederhana, *framing*

¹¹ Muhammad Zawawi Zulfitra, “Analisis *Framing* Pemberitaan Korupsi Petinggi Organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Media Tempo.Co dan Liputan 6.Com” Universitas Putra Batam, 2023

adalah membingkai sebuah peristiwa atau dengan kata lain *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita.¹²

Dengan menggunakan analisis *framing*, pembingkaiian realitas (peristiwa, individu, kumpulan, dan lainnya) dapat dipelajari, pembingkaiian ini adalah komponen konstruksi yang bermanfaat karena fakta ditafsirkan dan direkonstruksi dengan cara dan arti tertentu. Akibatnya, hanya anggota tertentu yang menarik perhatian, dianggap signifikan, dan menarik bagi muslimat penonton. Melihat frame banyak digunakan dalam analisis *framing* disurat kabar, sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis sendiri.

Selain itu, *framing* memiliki banyak kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan metode analisis lainnya. Satu keuntungan dari analisis *framing* ini adalah bahwa Hackett menyatakan bahwa peneliti harus mengubah fokus mereka tentang media saat ini. Studi yang menggunakan kaidah objektivitas dan bias untuk memahami ideologi dalam berita tidak boleh dilakukan. Menurut Hackett, studi yang lebih baik menggunakan konsep *framing* sebagai alat analisis karena, menurut Stephen Reese dalam buku *Framing Public Life* yang diterbitkan pada tahun 2008, metode analisis *framing* sangat diminati dan banyak digunakan oleh pengkaji media

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Arti kata Bingkai-Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

di seluruh dunia. Dengan menggunakan analisis *framing*, peneliti dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam berita dan membantu membongkar pesan yang tersembunyi di balik berita yang diteliti.

Menurut Eriyanto, fokus dari analisis *framing* adalah cara media memahami dan menafsirkan realitas. Metode pemahaman yang dikenal sebagai *framing* bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis informasi atau membuat konten.¹³ Dari pengertian *framing* tersebut terdapat satu kesamaan yang disimpulkan bahwa *framing* ialah pendekatan untuk melihat bagaimana media mengonstruksi realitas. Analisis *framing* juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.

Sebuah metode analisis teks, analisis *framing* mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. Dalam analisis isi kuantitatif, yang ditekankan adalah isi (*content*) dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara dalam analisis *framing* yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks. *Framing* terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikan kepada khalayak.¹⁴

Analisis *framing* adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Analisis *framing* juga termasuk

¹³ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta, Lkis, 2007). 3

¹⁴ Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta, Lkis, 2007). 11

dalam paradigma konstruksionis. Paradikma konstruksionis mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya.¹⁵

Analisis *framing* mempunyai banyak model yaitu Model Murray Edelman, Robert N Entman, William A. Gonso maupun Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis Robert N Entman.

2. Framing Model Robert N. Entman

Robert N Entman menciptakan pondasi untuk analisis *framing* studi media dengan menggambarkan bagian seleksi dan menunjukkan bagian tertentu dari realitas yang dibangun oleh media massa. *framing* dapat dianggap sebagai penempatan informasi dalam konteks tertentu, sehingga masalah tertentu diberi prioritas lebih tinggi dari pada masalah lainnya. *Framing* juga meningkatkan tekanan pada tampilan teks komunikasi dan anggota mana yang ditampilkan atau dianggap penting oleh pembuat teks.¹⁶

Untuk mengetahui bagaimana pembingkai yang digunakan media, sebuah perangkat *framing* yang dikemukakan Robert Entman dapat menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa dan ditandakan oleh wartawan. Entman membagi perangkat *framing* ke dalam empat elemen. Menurut

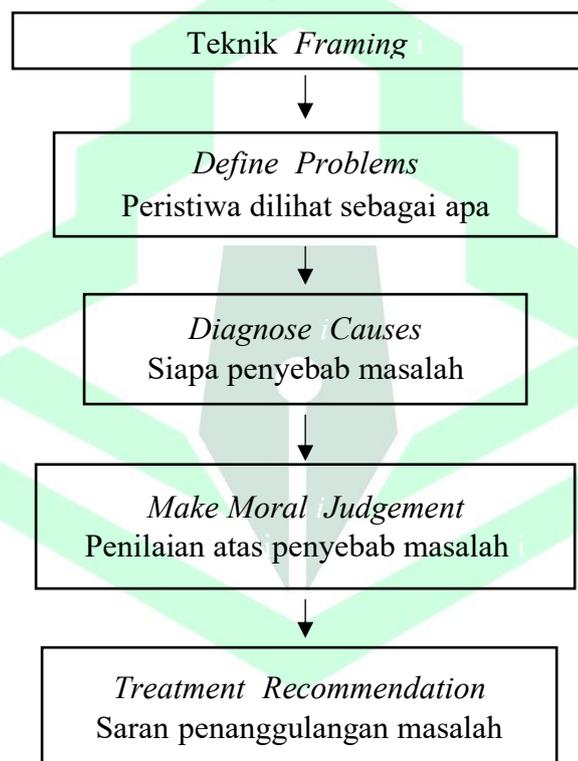
¹⁵ Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta, Lkis, 2007), h 12

¹⁶ Eriyanto, *Analisis Framin : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta, Lkis, 2007), h.12

Entman, *framing* dalam berita masalah (*problem identification*), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa; kedua, pada identifikasi penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (*moral evaluation*), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*) yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya, lebih jelasnya, keempat cara tersebut dapat dilihat pada skema dibawah ini.

¹⁷ Berdasarkan teori diatas itulah peneliti akan menggunakan teori Robert Entman sebagai teori analisisnya.

Gambar 2.1 Konsep *Framing* Robert N. Entman



¹⁷ Alex Sobur, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 173

3. Berita

a. Pengertian Berita

Berita selalu ada di kehidupan kita. Banyak orang yang mendefinisikan berita sebagai sesuai dengan arah mata angin yang kemudian sampai pada kesimpulan bahwa dimanapun seseorang pergi ada kejadian. Berita menurut Adi Bajuri adalah laporan suatu peristiwa yang sudah terjadi, gagasan atau pendapat seseorang atau kelompok atau temuan baru di segala bidang yang dipandang penting untuk diliput wartawan yang bertujuan untuk dimuat dalam media.¹⁸

Sebenarnya, istilah "berita" berasal dari bahasa sansekerta, *Vrit*, yang dalam bahasa Inggris berarti "ada" atau "terjadi", dan dalam bahasa Indonesia, *Vritta* berarti "berita atau warta".¹⁹ Sedangkan menurut KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Tidak ada definisi berita yang disepakati oleh publistik dan jurnalis. Namun, para ahli jurnalistik lebih sederhana mendefinisikan berita sebagai apa yang Ditulis oleh surat kabar, disiarkan di radio, dan diberitakan di televisi. ditulis oleh surat kabar dan apa yang ditayangkan di televisi. Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan sebuah berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar serta dapat menarik perhatian sebagian pembaca. Selain itu pendapat lain juga dikemukakan oleh Williard C. Bleyer, Bleyer mengatakan bahwa sebuah berita merupakan suatu hal yang

¹⁸ Anton Mabruk KN, *Produksi Program TV Non-Drama*, (Gramedia:2018), h 261

¹⁹ Indah Suryawati, *Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, (Ghalia Indonesia:2011), h 67

aktual dan dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam sebuah surat kabar karena aktual tersebut dinilai dapat menarik/mempunyai makna tersendiri bagi pembaca. William S. Maulsby berita didefinisikan sebagai ucapan yang benar dan tidak memihak tentang peristiwa penting dan baru yang menarik perhatian pembaca surat kabar. Menurut Eric C. Hepwood, laporan pertama tentang peristiwa tersebut penting dan dapat menarik perhatian umum.²⁰ Sedangkan Harris Sumadiria berpendapat bahwa berita merupakan sebuah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio televisi, atau media online yakni internet.²¹

Berita merupakan sebuah sajian informasi tentang suatu kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi saat itu juga. Proses penyajian berita dapat dilakukan melalui informasi berantai dari mulut ke mulut atau secara langsung. Selain itu ada juga yang menggunakan media, seperti media cetak yaitu koran dan majalah, maupun media elektronik seperti televisi dan radio. Namun di zaman sekarang ini sudah ada kategori media baru yakni internet. Saat ini internet sudah sangat menjamur di masyarakat dan sudah menjadi kebutuhan tambahan untuk memperoleh informasi tambahan yang tidak bisa ditinggalkan karena internet memiliki waktu yang sangat singkat agar bisa diterima oleh orang. Penulisan berita

²⁰ Aziz Hakim Astqolani, *Nilai Berita Dan Etika Media Tinjauan Teori Ekonomi dan Politik Media-Mosco* (Analisis Teks Pemberitaan Perampokan dan Penyanderaan Di Pondok Indah Jakarta 3 September 2016 Di Kompas Tv), 2017, h 42

²¹ Puji Lestari Ahditia, *Analisis Wacana Pemberitaan Pro Kontra Pemidanaan Pelaku Nikah Siri di Harian Seputar Indonesia* (Edisi Februari 2010), 2011 h 24

di media baik dalam media cetak ataupun elektronik harus memperhatikan 5W+1H (*What, Why, Where, Who, When, dan How*), *What*=apa yang terjadi, *Where*=dimana peristiwa itu terjadi, *When*=kapan peristiwa itu terjadi, *Who*=siapa yang terlibat, *Why* kenapa peristiwa itu bisa terjadi, dan *How*=bagaimana peristiwa itu terjadi.

Berita menjadi menarik dan memiliki kualitas apabila ditulis berdasarkan fakta dan peristiwa yang telah terjadi sehingga dapat disebut sesuai dengan fakta yang terjadi saat itu juga. Kemenarikan sebuah berita biasanya terdapat dalam judul yang digunakan, sedangkan dalam media elektronik sebuah berita juga memiliki daya tarik apabila disampaikan dengan baik dan juga menggunakan visual yang baik pula. Judul berita akan sangat penting untuk mengantarkan pembaca masuk ke dalam berita. Judul berita digunakan untuk merangkum isi berita kepada pembaca mengenai isi berita. Sama halnya dengan media cetak, media elektronik juga harus memiliki judul yang baik agar dapat di pahami dan diterima oleh pemirsa ataupun pendengar.

Penulisan judul dalam sebuah berita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jelas dan tidak ambigu.²² Penggunaan singkatan dapat diterapkan dalam penulisan judul, akan tetapi singkatan yang digunakan merupakan singkatan yang sudah biasa digunakan dan dipahami oleh pembacanya. Judul berita yang baik setidaknya memenuhi beberapa syarat

²² Hoppy Nurjayanti, "Analisis Penggunaan Singkatan Pada Judul Berita di Harian Jawa Po" Edisi Oktober-November 2013,2014, h 2

yakni: singkat-padat, relevan, fungsional, formal, representatif, menggunakan bahasa baku, dan pesifik.

b. Jenis-jenis Berita

Dalam berbagai literatur, berita dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu *hard news*, *soft news*, dan *indepth news*.

1) *Hard news* (berita berat)

Hard news merupakan berita mengenai peristiwa yang dianggap penting bagi masyarakat baik sebagai individu, kelompok, maupun organisasi. Secara penggolongan *hard news* merupakan kategori berita langsung yang sama halnya dengan *straightnews* dan *spotnews*. Aktualitas merupakan sebuah bagian penting dalam berita langsung termasuk masih mencakup pengetahuan dan juga temuan-temuan terbaru. Selain itu pada *hard news* sendiri masih mudah untuk memperoleh data atau informasi dikarenakan informasi tersebut masih baru dan transparan.

2) *Soft News* (berita ringan)

Soft news seringkali disebut sebagai berita *feature*, yaitu berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun memiliki sebuah daya tarik bagi pemirsa atau khalayak. Berita bertipe ini seringkali menitikberatkan pada hal-hal yang membuat takjub atau membuat khalayak terheran-heran.²³ Williamson menyertakan beberapa unsur

²³ Hoppy Nurjayanti, "Analisis Penggunaan Singkatan Pada Judul Berita di Harian Jawa Pos" Edisi Oktober-November 2013,2014, h 70

yang memiliki *feature*, yakni kreativitas (*creativity*), subjektivitas (*subjectivity*), informatif (*informativeness*), menghibur (*entertainment*), tidak dibatasi waktu (*unperishable*). Kreativitas menunjukkan pelaporan *feature* sebagai upaya mengkreasikan sudut pandang dari penulis berdasarkan riset terhadap fakta. Subjektivitas memungkinkan menggunakan sudut pandang orang pertama dengan emosi campur nalar sebagai cara melaporkan fakta. Informatif menyirat materi pelaporan tentang hal-hal yang ringan namun berguna. Menghibur merupakan upaya untuk membuat pemirsa atau pembaca dapat larut dalam suasana yang digambarkan pada berita. Dan tidak dibatasi waktu yang berarti *feature* tidak akan lapuk dimakan *deadline* karena topik yang dibahas secara mendalam.²⁴

3) *Indepth news* (berita mendalam)

Berita mendalam merupakan berita yang memfokuskan pada peristiwa/fakta atau pendapat yang memiliki nilai berita. Berita mendalam menempatkan sebuah fakta atau pendapat dalam suatu mata rantai sebuah laporan pemberitaan dan merefleksikan masalah dalam konteks yang luas lagi. Jenis berita yang tergolong dalam berita mendalam yakni komprehensif, berita interpretative dan berita investigatif. Khusus untuk berita interpretatif dan berita investigatif

²⁴ Septiawan Santana K., Menulis Feature, (Pustaka Bani Quraisy: 2005) hal 11

biasanya disingkat berdasarkan sebuah peristiwa atau masalah yang terjadi kontroversi.

4. Media Baru

a. Pengertian Media Baru

Media baru menurut Mc-Quil adalah perangkat teknologi elektronik yang terdiri dari berbagai sistem teknologi: transmisi, miniaturisasi, penyimpanan dan pencarian informasi, penyajian gambar, dan sistem pengendalian. Media baru mengutamakan format isi yang dikombinasikan dengan suara, gambar, teks, dan berbagai elemen lainnya, seperti video, yang membedakan mereka dari media lama. format baru atau digital, dan juga pada sistem penyebarannya yaitu melalui jejaring internet.²⁵

Seiring dengan perkembangan sebuah teknologi sarana dan prasarana telekomunikasi selalu memberikan inovasi terbaru yaitu media baru, yang dimana ini dilakukan karena ingin memberikan pembaharuan dari media lama seperti televisi, koran, tabloid, majalah dan buku karena media-media tersebut sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan gaya hidup masyarakat modern yang memiliki sifat ingin serba praktis dan cepat.²⁶

Dalam Format media baru menekankan pada isi format dalam media yang terkombinasi dengan baik suara, gambar, teks dan berbagai unsur-unsurnya yang meliputi video dalam format baru digital, seperti *Facebook*,

²⁵ Mubarakah Nur Faizatul, "Analisis Framing Robert N. Entman terhadap berita kontra radikalisme pada akun Youtube NU Channel", (UIN Sunan, Ampel Surabaya, 2021)

²⁶ Sri Hastarjo, *New Media: Teori dan Aplikasi* (Karanganyar, Lindu Pustaka, 2011), h 5

Twitter, Instagram, Youtube, Line Today dan lain-lain dalam sistem penyebarannya media baru menggunakan jejaring internet dimana internet ini lebih cepat untuk menyebarkan informasi yang diinginkan.

b. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online tempat para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagai dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki forum, dan dunia virtual. Blog, wiki dan jejaring sosial media utamanya youtube, facebook dan twitter merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan masyarakat diseluruh dunia. Tidak heran jika media sosial menjadi fenomenal. Media tersebut tidak hanya digunakan untuk portal pertemanan virtual, media sosial tersebut juga bisa dijadikan untuk mendistribusikan informasi yang bisa dikreasikan oleh pemilik akun itu sendiri.²⁷

Media sosial telah menjadi bagian kehidupan manusia dimodern saat ini diperkirakan yang menjadi tren adalah 3S yaitu *Social, Share dan Speed*. Masyarakat bersosial saling berinteraksi terkait apa saja membagikan hal-hal atau peristiwa yang terjadi dan kecepatan yang menjadikan media sosial ini sangat digemari oleh masyarakat.²⁸

Fungsi media sosial menurut Mc-Quail bahwa fungsi media bagi masyarakat adalah memberikan:

²⁷ Asep Syamsul, M Romli. *Jurnalistik Online*, (Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia,2017) h 104

²⁸ Asep Syamsul, M Romli. *Jurnalistik Online*, (Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia,2017) h 105

- 1) Informasi yaitu inovasi, adaptasi dan kemajuan
- 2) Korelasi yaitu menjelaskan, mengomentari makna peristiwa dan informasi, menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan, mengkoordinasi beberapa kegiatan, membentuk kesepakatan, mengekspresikan kebudayaan, melestraikan nilai-nilai.
- 3) Hiburan yaitu meredakan ketegangan sosial
- 4) Mobilisasi yaitu mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam kegiatan politik, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan juga dalam bidang agama.²⁹

Media sosial adalah konten oleh pengguna atau yang lebih populer disebut dengan *User Generated Content (UGC)*. Term ini menunjukkan bahwa konten yang ada di media sosial adalah milik pengguna atau pemilik akun. Konten oleh pengguna juga sebagai penanda bahwa dalam media sosial penggunanya tidak hanya memproduksi konten tetapi juga mengkonsumsi konten yang juga diproduksi oleh pengguna lainnya. Kehadiran teknologi memungkinkan terjadinya produksi dan sirkulasi konten yang bersifat massa atau dari pengguna.³⁰

²⁹ Ali Akbar, “Efektifitas Youtube Sebagai Media Penyebaran Informasi” (Skripsi, UIN AR Raniry, Banda Aceh, 2018)

³⁰ Mubarakah, Nur Faizatul, “Analisis Framing Robert N. Entman Terhadap Berita Kontra Radikalisme pada Akun Youtube NU Channel”, (UIN Sunan, Ampel Surabaya, 2021)

c. Media YouTube

YouTube merupakan sebuah laman yang memanfaatkan web untuk menjalankan *highlight*-nya, dengan adanya Youtube, seorang klien web bisa memposting atau menampilkan rekaman atau gerakannya sehingga dapat dilihat dan diapresiasi oleh banyak orang. Namun, banyaknya klien youtube, tentu saja akan memicu persaingan yang ketat, terutama dalam hal melakukan latihan khusus. *YouTube* juga mempunyai fitur berbagi video sehingga dapat dilihat oleh siapapun yang mengklik video tersebut. Terdapat didalamnya berbagai macam video seperti video tutorial, video music, berita, video dokumenter dan lain-lain.³¹

Setiap perkembangannya peran youtube bertambah menjadi jalur distribusi bagi kalangan, mulai dari pembuat konten sampai pengiklan, sebagai ajang berbagi, menginformasikan, menginspirasi pengguna internet diberbagai belahan dunia.³²

Awal mula *YouTube* terbentuk yaitu pada tahun 2005 yang didukung oleh tiga karyawan perusahaan *finance online* PayPal di Amerika Serikat yaitu *Chand Hurley, Steven Chen, And Javed Karim* nama *You Tube* sendiri terinspirasi dari nama sebuah kedai pizza dan restoran Jepang di *San Mateo, California*. Pada November 2011, jejaring sosial *Google* terinspirasi langsung dengan *You Tube* dan penjejah *web chrome*, sehingga

³¹ Ruli Nasrullah, Media Sosial: “*Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*”, (Bandung: Simbiosis Media,2015) h 24

³² Ruli Nasrullah, Media Sosial: “*Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*”, (Bandung: Simbiosis Media,2015) h 25

video-video *You Tube* bisa ditonton di *Google*, pada bulan Desember 2011, *You Tube* meluncurkan gaya baru. Kanal video ditampilkan dikolom tengah halaman utama, seperti umpan berita situs-situs jejaring sosial. Pada saat yang sama versi baru logo *YouTube* dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap.³³

You Tube *advertising* atau *You Tube Ads* merupakan fitur yang disediakan oleh *You Tube* sebagai media promosi bagi pemilik *brand*, perusahaan atau digital marketer untuk mempromosikan konten produk atau jasa mereka di *You Tube*, berbeda dengan platform periklanan digital lainnya seperti *facebook* dan *linkedin* menggunakan *page manager*, *You Tube Ads* menggunakan *google aswords*. Orang berkunjung dan menyukai *You Tube* karena keberadaannya konten video, sehingga video ads adalah cara paling efektif untuk menjangkau *audiensi* dan membangun *brand* di *You Tube*. Jenis *You Tube ads* ada 3 yaitu:³⁴

1) *Trueview Ads*

Trueview ads adalah jenis video ads paling standar di *You Tube*, dengan *trueview ads* ini, *brand* atau pemasangan iklan hanya membayar ketika *audiens* menonton iklan selama 30 detik hingga selesai atau jika mengambil tindakan seperti mengklik *call-to-action*. Selain itu, terdapat aturan *You Tube* yang mengharuskan *trueview ads* yang dapat dilewatkan

³³Chandra, E, "You Tube Citra Media Informasi atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi", *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, (2017), h 406.

³⁴Chubbyrawit.id, Berkenalan dengan You Tube Adversiting, (2021), [Http://chubbyrawit.id](http://chubbyrawit.id).

(*skippable*) berdurasi antara 12 detik dan 6 menit, dan iklan *trueview ads* yang tidak dapat dilewatkan (*non-skippable*) berdurasi 15-20 detik.

Trueview ads dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a) *Video discovery ads*, video ini dulunya dikenal dengan nama *In-Display Ads*. Video jenis ini ditampilkan di *homepage You Tube*, halaman hasil pencarian dan sebagainya video terkait di halaman menonton video *You Tube*.

b) *In-Stream Ads*, video ini diputar sebelum seseorang menonton video yang mereka pilih di *You Tube*. Pemirsa pun sering memiliki opsi untuk melewatkan iklan setelah menonton selama 5 detik.

2) *Non-Skippable Ad*

Iklan jenis ini yang tidak dapat dihindari, pada akhirnya *audiens* mulai untuk mentolerir keberadaan video *ads* jenis ini dengan melakukan kegiatan lain selama 20 detik sebelum menonton video *You Tube* yang sebenarnya. Ada dua jenis *non-skippable ads* yaitu:

a) *Pre-roll ads*, yang muncul sebelum video diputar

b) *Mid-roll ads*, yang muncul di tengah video setelah 10 menit atau lebih oleh karena *ads* jenis ini tidak dapat dilewatkan (*non-skippable*) video *ads* sangat fokus dan jelas menampilkan nilai produk kepada *audiens* sebagai target. Disini cara mengkomunikasikan pesan yang disampaikan lewat audio dan visual.

3) *Bumper Ads*

Bumper ads merupakan non-skippable ads versi yang lebih dapat ditoleransi karena durasi paling lama 6 detik. Biasanya, iklan ini muncul di akhir video *You Tube* dan dibayar berdasarkan *Cost Per Mille* (CPM). Karena durasi yang pendek, *bumper ads* sangat ideal untuk menargetkan para pengguna seluler. Pengiklanan juga dapat mendaur ulang konten lama dalam bentuk iklan yang lebih singkat.

You Tube adalah salah satu *platform online* populer saat ini. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan *You Tube* di Indonesia semakin banyak merek yang menyadari potensi *You Tube* dalam menarik konsumen lewat penyampaian pesan kreatif. Masyarakat Indonesia menyadari bahwa dengan menggunakan *You Tube* memudahkan mereka dalam mencari konten yang menarik dengan topik yang beragam.³⁵

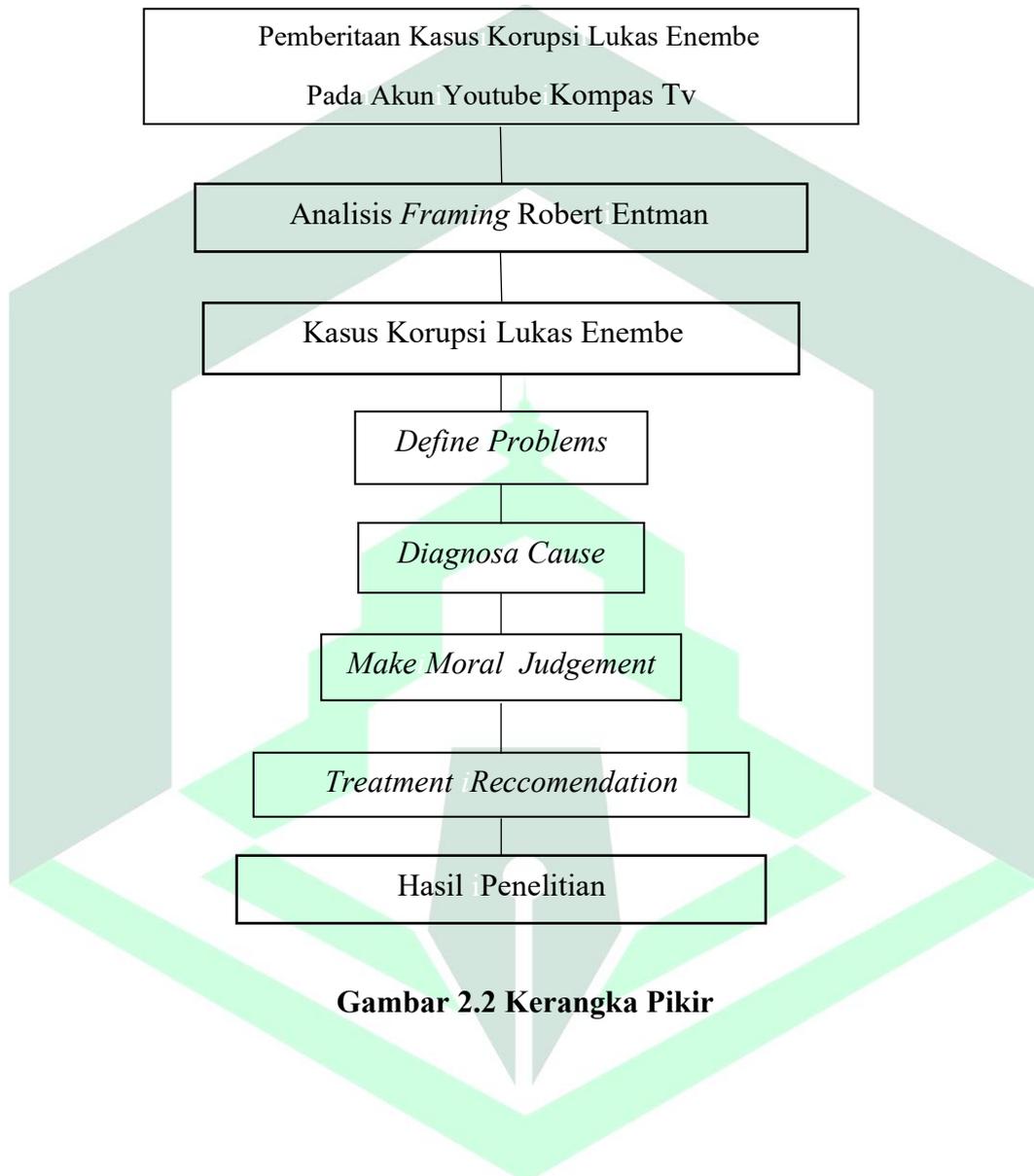
Perkembangan *Channel* pemasaran ikut membuat cara penyampaian pemasaran pun berubah. Hal ini juga mulai dipikirkan oleh *advertising agency* dimana *content strategy* menjadi alat pemasaran sebuah produk atau jasa. Secara detail *content strategy* marketing merupakan strategi pemasaran dimana harus merencanakan dan mendistribusikan konten yang mampu menarik audiens dengan tepat sasaran, serta mendorong target pemasaran dengan tepat sasaran, serta mendorong target *audiens* untuk menjadi konsumen, agar lebih memahami seperti apa konten saat ini.³⁶ Terdapat

³⁵ Jonathan Arwano dan K Prihartono, *Perdagangan Online Cara Bisnis diinternet*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2015), 2, <https://books.google.co.id>.

³⁶ Sylvie Nurfebriani, *Manajemen Periklanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h 23

berbagai macam bentuk strategi konten marketing dimana sebetulnya sering sekali melihat bentuknya.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan teori analisis *framing* Robert N. Entman menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa dan ditandakan oleh wartawan. Entman membagi perangkat framing ke dalam empat elemen. Menurut Entman, framing dalam berita masalah (*Problem Identification*), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa; kedua, pada identifikasi penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (*Moral evaluation*), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*) Dimana Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terkait dengan kehidupan subjek penelitian.³⁷

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati dalam media akun YouTube Kompas TV. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memiliki lokasi dikarenakan objek yang diteliti merupakan berita pada media akun Youtube Kompas TV terhadap pemberitaan kasus korupsi Lukas Enembe.

³⁷ Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.VIII (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 6.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah sangat penting untuk menghindari adanya salah satu penafsiran dalam memahami penelitian ini:

1. Analisis *framing*

Penelitian ini berfokus pada analisis berita tentang pemrosesan kasus Lukas Enembe, media online yang dipilih adalah Kompas Tv alasan penulis memilih Kompas Tv sebagai objek penelitian adalah berita yang ditampilkan inspiratif, berita yang dapat menginspirasi dan menekankan nilai-nilai yang positif dalam setiap tayangannya. Ini bisa menjadi fokus penelitian, seperti yang di ambil penulis bagaimana analisis *framing* pemberitaan kasus korupsi Lukas Enembe pada akun Youtube Kompas Tv.

Untuk mengetahui bagaimana pembingkaiian yang digunakan media, sebuah perangkat framing yang dikemukakan Robert Entman dapat menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa dan ditandakan oleh warawan. Entman membagi perangkat framing ke dalam empat elemen. Menurut Entman, framing dalam berita masalah (*Problem Identification*), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa; kedua, pada identifikasi penyebab masalah; ketiga, pada evalui moral (*Moral evaluation*), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*) yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kалан memprediksikan hasilnya.

2. Berita

Penulis akan menganalisis 5 berita yang dimuat pada tanggal 9 Mei 2023-29 Desember 2023, dimana total keseluruhan berita sejumlah 87 berita.

3. Kasus Korupsi Lukas Enembe

Korupsi Lukas Enembe pada September 2022, setelah penyidikan yang dilakukan oleh KPK Lukas Enembe ditetapkan sebagai tahanan KPK pada 10 Januari 2023. Lukas Enembe diproses hukum oleh KPK karena dugaan penerimaan suap sebesar 1 Milyar rupiah dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP). Selain itu, Lukas Enembe juga diduga menerima suap gratifikasi sebesar 10 Milyar rupiah. Kasus ini mencuat setelah serangkaian investigasi dan pengumpulan bukti oleh KPK yang mengarah pada dugaan keterlibatan Lukas Enembe dalam tindak korupsi dan pelanggaran etika.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari Youtube KompasTV tentang kasus korupsi Lukas Enembe dengan memilih elemen visual dan elemen audio dari unsur video yang diperlukan.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sekumpulan data yang dihimpun dari sumber lain seperti jurnal, artikel, youtube dan internet yang berkenaan dengan kasus korupsi Lukas Enembe.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan dimana peneliti sebagai penonton atau penyaksi kejadian yang menjadi topik penelitian. Peneliti melihat atau mendengarkan objek yang diteliti tanpa partisipasi aktif di dalamnya.³⁸ Pengamatan dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diteliti. Peneliti menonton dan mengamati berita kasus korupsi Lukas Enembe pada akun Youtube Kompas TV.

2. Dokumentasi

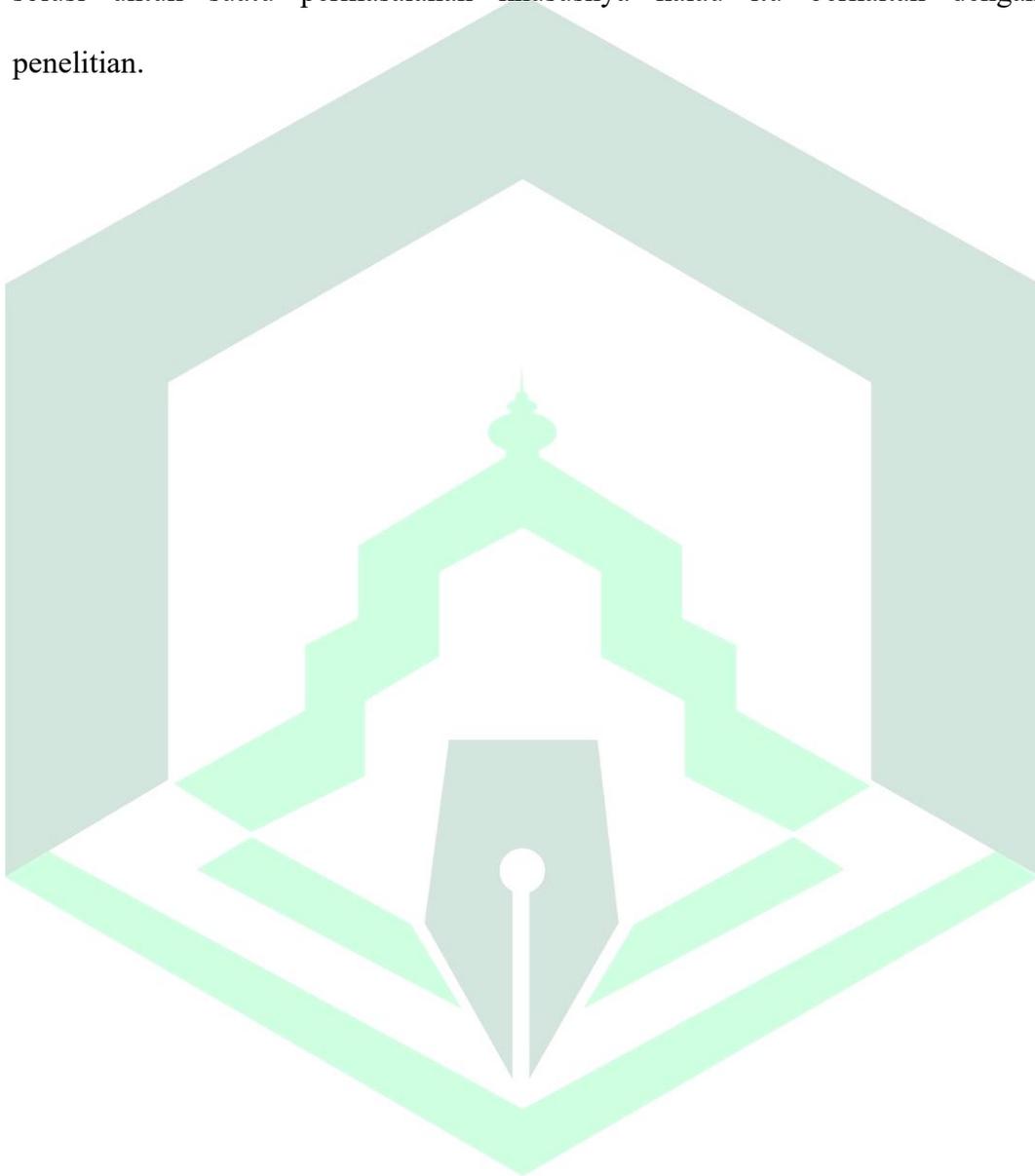
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis, yaitu literatur-literatur kasus korupsi Lukas Enembe (seperti resensi, dan artikel di situs berita online di youtube), serta buku-buku yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Pengolahan data adalah sebuah proses yang dapat mengubah suatu data mentah menjadi sebuah informasi yang utuh dan juga memiliki manfaat. Jadi kumpulan data mentah yang belum berbentuk sebuah informasi yang bisa disimpulkan ketika masuk proses pengolahan data yang akan menjadikan data tersebut sebuah informasi yang baru.

³⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) h 40.

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Proses ini cukup penting agar karakteristik data bisa menjadi lebih mudah untuk kita mengerti dan berguna sebagai solusi untuk suatu permasalahan khususnya kalau itu berkaitan dengan penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. DESKRIPSI DATA

1. Profil Data Kompas TV

Gambar 4.1 Logo Kompas Tv



a. Profil Kompas Tv

Diluncurkan	: 9 September 2011
Pemilik	: Kompas Gramedia
Format Gambar	: 4:3 SDTV PAL (2011-2014), 16:9 HDTV PAL/SECAM/NTSC (2014-Sekarang)
Slogan	: -Inspirasi indonesia (9 September) 2011-28 Januari 2016) -Berita dan Informasi (2015-2016) -Berita dan Inspirasi Indonesia (28 Januari 2016-19 Oktober 2017) -Independen Terpercaya (19 Oktober 2017- sekarang)

Wilayah siar Nasional : Kantor Pusat Menara Kompas Lt.6, Jl.Palmerah
Selatan No.21, Jakarta Pusat 10270 Indonesia

Saluran Seinduk : KTV (2011- Sekarang)

Situs web : www.kompas.tv

b. Logo Kompas TV

Gambar 4.2 Logo Pertama Kompas TV (9 September-11 September 2011 dan digunakan kembali pada 5 Oktober 2012-19 Oktober 2017)



Gambar 4.3 Logo kedua Kompas TV (11 September 2011-5 Oktober 2012)



Gambar 4.4 Logo ketiga Kompas TV (19 Oktober 2017-Sekarang)



2. Profil Data Youtube

Gambar 4.5 Logo Youtube LLC



a. Profil Youtube

Jenis Usaha : Anak perusahaan Google, perusahaan berkewajiban terbatas

Jenis Situs : Layanan penyimpanan video

Bahasa : 54 Bahasa melalui antarmuka pengguna

Didirikan : 14 Februari 2005

Kantor Pusat : 901 Cherry Ave, San Bruno, California, Amerika
Serikat

Wilayah Operasi : Global

Pemilik : Alphabet Inc.

Pendiri : Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim

Tokoh penting : Susan Wojcicki (CEO) Chad Hurley (Penasihat)

Sektor : Internet

Perusahaan Induk : -Independen (2005-2006) – Google (2006-Sekarang)

Slogan : Broadcast Yourself (2005-2012)

Situs Web : www.youtube.com

Iklan : Goggle AdSense

Daftar Akun : Opsional (untuk melihat video bertanda,
Komentar Bertanda, dan mengunggah video)

Diluncurkan : 14 Februari 2005

Status : Aktif

Bahasa pemrograman : Java, Python

b. Misi Youtube

Berikut adalah misi YouTube yang dikutip dari laman resminya :

- 1) Misi kami adalah memberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan menunjukkan dunia kepada setiap orang.
- 2) Kami yakin setiap orang berhak menyampaikan pendapat, dan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita bersedia mendengar,

berbagi, dan membangun komunitas melalui kisah-kisah yang kita miliki.

- 3) Misi tersebut didasarkan pada nilai yang dimiliki yaitu empat kebebasan utama yang menentukan siapa kita, berikut bentuknya yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan mendapatkan informasi, kebebasan menggunakan peluang, dan kebebasan memiliki tempat berkarya.

c. Pengguna Youtube

Sebagaimana Dilaporkan oleh situs resmi youtube Dilansir dari situs resmi Youtube, statistik penggunaan youtube adalah sebagai berikut:

- 1) Lebih dari 1 miliar pengguna, jumlah tersebut adalah semua pengguna Youtube artinya hampir sepertiga dari seluruh pengguna internet.
- 2) Pengguna berusia 18-34 tahun sedang menonton video. Youtube, diperangkat selular saja telah menjangkau lebih banyak orang dari penonton di Amerika Serikat daripada jaringan TV manapun.
- 3) 91 Negara dan 80 bahasa. Youtube diterjemahkan di 91 negara dan dapat diakses dalam 80 bahasa.
- 4) 1 miliar jam konten ditonton setiap harinya. Ini adalah jumlah jam video Youtube yang ditonton setiap hari, yang menghasilkan miliaran penayangan.

d. Kebijakan dan Keamanan

Youtube memiliki kebijakan dan protokol keamanan untuk memastikan bahwa penggunaannya tetap aman. Pengguna dapat bergabung dengan komunitas global. Jutaan pengguna lain membutuhkan tanggung jawab dan kepercayaan. Karena melanggar pedoman komunitas, konten yang ada di youtube pasti tidak disukai. Untuk melaporkan konten yang dianggap tidak pantas, fitur pelaporan dapat digunakan. Staf Youtube meninjau konten segera, 24 jam sehari seminggu Youtube memiliki berbagai aturan umum yang telah ditetapkan untuk dihindari masalah bagi pengguna yaitu:

- 1) Konten seksual atau ketelanjangan
- 2) Konten yang merugikan atau berbahaya
- 3) Konten yang mengandung kebencian
- 4) Konten kekerasan atau vulgar
- 5) Pelecehan dan cyberbullying
- 6) Spam, metadata yang menyesatkan, dan scam
- 7) Ancaman
- 8) Hak cipta
- 9) Privasi
- 10) Pebiruan Identitas
- 11) Membahayakan anak

B. Pembahasan

1. Profil Lukas Enembe

Pria yang memiliki nama asli Lomato Enembe ini lahir di kampung Mamit Distri Kombu, Tolikara, Papua pada 27 Juli 1967. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di FISIP Universitas Sam Ratulangi, Manado saat berusia 28 tahun. Lulus kuliah, ia masuk pegawai negeri. Diawali sebagai CPNS hingga menjadi PNS di Kantor Sospol Kabupaten Marauke. Tak lama setelah itu Lukas Enembe memulai karier politiknya sebagai wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya mendampingi Eliezer Renmaur sejak 2001.

Suami dari Yewuce Enembe ini kemudian terpilih sebagai Bupati Kabupaten Puncak Jaya saat berusia 40 tahun lalu. Pada 2013 ia mengemban jabatan yang jauh lebih besar yakni sebagai Gubernur Papua dengan wakilnya Klemen Tinal untuk periode 2011-2018. Dalam karier politiknya, ia bergabung dengan Partai Demokrat.

Lukas adalah gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. Ia dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat. Lukas mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Setelah menjabat selama 5 tahun, ayah 3 anak ini kembali terpilih bersama Klemen Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk periode 2018-2023. Mereka menang telak dengan meraih 1.939.539 suara atau 67,54 persen suara.

2. Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Kasus Korupsi Lukas Enembe di Akun Youtube Kompas TV

Lukas Enembe merupakan seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Papua sejak April 2013 hingga Januari 2023. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Papua, ia pernah menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya pada tahun 2006. Namun, perjalanan karier politiknya tidak lepas dari kontroversi. Pada September 2022, nama Lukas Enembe mencuat ke publik setelah muncul dugaan kasus korupsi yang melibatkan dirinya.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengarah pada penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka. Setelah melalui serangkaian proses hukum, Lukas Enembe secara resmi menjadi tahanan KPK pada 10 Januari 2023. Adapun berita yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dugaan Korupsi Lukas Enembe di Papua .
- b. Keterangan 3 Saksi soal Aliran Dana Rp1 M di Sidang Kasus Korupsi Lukas Enembe.
- c. KPK Sebut Kasus Lukas Enembe Berakhir tapi Negara Bisa Tuntut Ganti Rugi.
- d. Awal Karir Lukas Enembe dan Sekelumit Kasus Hukum yang Menjeratnya.
- e. Lukas Enembe Meninggal, KPK Sebut Pertanggung jawaban Pidananya Berakhir.

Pendekatan analisis *framing* Robert N. Entman memberikan kerangka kerja yang efektif untuk memahami bagaimana Kompas TV membingkai pemberitaan mengenai kasus korupsi Lukas Enembe di kanal YouTube-nya.

Entman memaparkan bahwa *framing* dilakukan melalui empat elemen utama, yaitu definisi masalah (*Define problem*), diagnosis penyebab (*Diagnoses Cause*), penilaian moral (*Make Moral Judgement*), dan rekomendasi solusi (*treatment recommendation*). Elemen-elemen ini membantu mengungkap bagaimana media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk perspektif publik terhadap isu yang diberitakan. Berikut disajikan 5 berita berdasarkan 4 elemen tersebut sesuai dengan *framing* dan analisisnya:

a. Berita 1 (Dugaan kasus korupsi Lukas Enembe Di Papua)

1). *Define problem* (pendefinisian masalah)

Elemen pertama dalam analisis framing menurut Robert Entman adalah *define problem*, yaitu bagaimana suatu peristiwa atau isu didefinisikan sebagai sebuah masalah utama dalam pemberitaan. Dalam hal ini, pemberitaan Kompas TV memfokuskan isu pada sosok Lukas Enembe yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Masalah utama yang ditampilkan dalam pemberitaan adalah keterlibatan Lukas Enembe dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek pembangunan oleh PT Tabi Bangun Papua. Pemberitaan tersebut menyoroti seriusnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat publik, sekaligus menampilkan kompleksitas kasus korupsi yang melibatkan tokoh politik terkemuka di Papua

.Melalui *framing* ini, Kompas TV membentuk persepsi kasus Lukas Enembe tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan hukum semata, melainkan juga mencerminkan adanya permasalahan sistemik dalam tata kelola proyek

pembangunan di daerah. Selain itu, kasus ini menunjukkan adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Dalam kasus korupsi Lukas Enembe, pemilihan narasumber juga merupakan dasar untuk memperkirakan masalah. Dalam menentukan *define problem* pernyataan narasumber yang dimuat dalam berita Kompas TV dengan judul "Jerat dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe"



Gambar 4.6 Narasumber Bapak Jokowi

Bapak Jokowi mengatakan bahwa:

"semua sama dimata hukum dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK."

Berita tersebut diunggah pada tanggal 2 Oktober 2023. Kutipan yang memperkuat elemen *define problem* dalam pemberitaan disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, pada menit 3:44 hingga 3:57 dalam tayangan tersebut. Pernyataan tersebut menjadi penegasan posisi pemerintah dalam menanggapi kasus korupsi yang melibatkan Lukas Enembe, sekaligus

menekankan bahwa isu ini merupakan masalah serius yang harus ditangani secara tegas dan transparan.

Dalam pemberitaan, terlihat bagaimana Kompas TV menyusun narasi yang menjadi landasan pembentukan *define problem*. Mengacu pada kutipan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “semua sama di mata hukum” dan menegaskan pentingnya menghormati panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kompas TV menegaskan bahwa kasus Lukas Enembe adalah persoalan hukum yang harus diproses secara adil tanpa adanya perlakuan istimewa. Kutipan ini sangat jelas Lukas Enembe harus menghadiri setiap panggilan yang berkaitan dengan kasusnya. Selain itu ketua umum Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono juga menyebut



Gambar 4.7 Narasumber Agus Harimukti Yudhoyono

Kemudian bapak Agus Harimukti Yudhoyono mengatakan:

”kami akan menelaah secara cermat apakah dugaan kasus pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya dan memegang teguh *the rule of law* termasuk mentaati asas praduga tak bersalah”

Dari Kasus ini korupsi wajib dibongkar tuntas proses hukum dan harus berjalan transparan sebagai satu-satunya jalan pembuktian yang jelas tak boleh ada

pihak yang merasa istimewa karena setiap warga negara berkedudukan sama dihadapan hukum. Berdasarkan hasil analisis wacana dan pemilihan narasumber, Kompas TV membangun persepsi publik mengenai kasus korupsi Lukas Enembe dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap proses hukum. Media ini menyampaikan bahwa dalam penyelidikan kasus tersebut, Lukas Enembe harus memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena prinsip yang ditegaskan adalah bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum.

Kompas TV menyusun persepsi dalam pemberitaan kasus korupsi Lukas Enembe. Dalam permasalahan ini Lukas Enembe melakukan korupsi dan gratifikasi sebesar 11 milyar Rupiah. Oleh karena itu Lukas Enembe di kenakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun selama pemanggilan KPK Lukas Enembe belum hadir dikarenakan sedang berobat di Singapura, Bapak Jokowi meminta menghormati hukum di KPK dan segera diperiksa. Disisi lain narasi soal ada tidaknya motif politik dalam kasus Lukas turut mencuat dimana Agus Harimukti Yudhoyono juga menyebut Akan menalaah kasus Lukas berdasarkan hukum atau tidak adanya unsur politik didalamnya.

Beberapa pihak menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap Lukas Enembe. Orang Asli Papua (OAP) berpendapat bahwa narasi yang dikembangkan oleh KPK mengenai keterlibatan Lukas Enembe dalam kasus ini cenderung dibesar-besarkan. Menurut pandangan mereka, hal tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap

Lukas Enembe serta memberikan kesan bahwa otoritas antikorupsi memberlakukan perlakuan yang tidak adil kepadanya.

Di sisi lain, KPK tetap mempertahankan komitmennya untuk menjalankan proses hukum secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak KPK selalu berupaya menjaga integritas dan melaksanakan tugasnya dengan transparansi demi terciptanya keadilan serta ketertiban dalam penegakan hukum.

2). Diagnoses Cause (memperkirakan penyebab masalah)

Diagnose cause merupakan komponen dalam framing yang berfungsi untuk membingkai siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa. Dalam konteks ini, penyebab tidak hanya merujuk pada apa yang menjadi sumber masalah, tetapi juga siapa yang dianggap sebagai aktor utama di balik peristiwa tersebut.

Pemahaman terhadap peristiwa sangat memengaruhi bagaimana media menentukan pihak atau faktor yang menjadi penyebab masalah. Dengan demikian, framing pada komponen diagnose cause akan membentuk persepsi publik mengenai siapa yang harus dipertanggungjawabkan atau disalahkan dalam suatu kasus. penyebab dari masalah kasus Lukas Enembe adalah tidak kooperatifnya Lukas dalam pelaksanaan penyelidikan tim KPK, sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam pemrosesan kasus korupsi.

Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengawasan yang tidak efektif membuka peluang bagi oknum pejabat untuk melakukan penyalahgunaan anggaran

tanpa terdeteksi. Ketidaktegasan dalam pengawasan mencerminkan lemahnya sistem birokrasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam birokrasi menjadi pemicu signifikan. Ketertutupan dalam proses pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan mempersulit masyarakat dan lembaga pengawas untuk memantau jalannya roda pemerintahan. Hal ini menciptakan celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh pejabat publik yang tidak berintegritas. Faktor lainnya adalah adanya potensi jaringan kolusi di tingkat pemerintahan yang memperburuk situasi. Hubungan saling menguntungkan antara oknum pejabat di berbagai tingkatan sering kali melanggengkan praktik korupsi, sehingga sulit dihentikan meskipun telah ada upaya hukum. Jaringan ini menciptakan lingkungan yang mendukung praktik ilegal dan menghalangi reformasi tata kelola pemerintahan.

Minimnya mekanisme *check and balance* di daerah otonom juga menjadi penyebab mendasar. Kontrol yang lemah dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah mengakibatkan pengelolaan anggaran tidak terawasi secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan besar tetapi tidak disertai tanggung jawab yang cukup. Terakhir, desentralisasi tanpa disertai sistem pengawasan yang kuat menjadi akar masalah yang signifikan. Ketika daerah diberikan otonomi dalam mengelola anggaran, seharusnya disertai dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak daerah yang gagal membangun

sistem pengelolaan keuangan yang transparan, sehingga memperbesar risiko terjadinya korupsi.

3). *Make Moral Judgement* (penilaian atas penyebab masalah)

Lukas Enembe dinilai gagal menjaga integritas kepemimpinan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Sebagai seorang pemimpin daerah, ia seharusnya menjadi teladan dalam menjaga kepercayaan masyarakat, namun tindakannya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi justru mencederai amanah yang telah diberikan rakyat Papua. Hal ini mencerminkan kegagalan besar dalam memenuhi tanggung jawab moral sebagai pemimpin yang memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pemberitaan mengenai kasus ini menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik korupsi, yang jauh lebih luas dari sekadar kerugian material negara. Korupsi yang melibatkan pejabat publik seperti Lukas Enembe telah menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Papua, serta mengurangi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat Papua yang sudah lama berjuang untuk mendapatkan fasilitas dasar dan infrastruktur yang layak, semakin terpuruk akibat penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab.

Tindakan korupsi ini dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Lukas Enembe. Masyarakat Papua berharap pemimpinnya mampu membawa perubahan dan kemajuan, namun kenyataan yang terjadi justru menambah beban hidup mereka.

Korupsi semacam ini juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi, yang menjadi landasan bagi setiap negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya publik secara adil dan merata.

Narasi moral yang berkembang dalam pemberitaan ini mengedepankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam kepemimpinan, terutama di wilayah-wilayah yang rentan seperti Papua. Kepemimpinan yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin dalam, di mana sebagian besar rakyat tidak merasakan manfaat dari kekayaan alam dan anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, pemberitaan juga menyoroti betapa pentingnya menciptakan budaya kepemimpinan yang berintegritas di Papua, agar masyarakat dapat memperoleh pemerintahan yang bersih dari korupsi. Melalui penegakan hukum yang adil dan transparan, diharapkan akan terbentuk sistem yang lebih kuat untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, masyarakat juga harus diberdayakan untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah mereka, untuk memastikan bahwa pejabat publik menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Dalam konteks yang lebih luas, penilaian moral terhadap tindakan Lukas Enembe ini menggarisbawahi pentingnya perubahan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di daerah yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal pembangunan. Integritas kepemimpinan harus menjadi prioritas utama agar pemerintahan dapat membawa manfaat yang maksimal bagi masyarakat, bukan

justeru mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

4). *Treatment Recommendation* (saran penanggulangan masalah)

Untuk menangani kasus korupsi ini secara efektif, penegakan hukum yang transparan menjadi langkah pertama yang sangat penting. KPK sebagai lembaga yang berwenang harus menangani kasus ini dengan penuh keterbukaan, agar proses hukum tidak hanya berjalan secara adil, tetapi juga memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, reformasi tata kelola dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga harus dilakukan secara menyeluruh agar pengelolaan dana tersebut lebih terpantau dan akuntabel. Penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat melalui lembaga pengawas baik internal maupun eksternal menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Papua, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Penguatan sistem pengawasan juga perlu diperhatikan dengan serius. Meningkatkan mekanisme check and balance baik di tingkat lokal maupun pusat dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Selain itu, integrasi teknologi dalam pengawasan keuangan akan sangat bermanfaat dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan, sehingga memperkecil ruang bagi praktek korupsi yang merugikan masyarakat. Peningkatan transparansi dalam birokrasi juga sangat diperlukan dengan memastikan proses pengelolaan dana publik lebih terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana. Hal ini

akan menciptakan rasa tanggung jawab kolektif antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga penggunaan anggaran yang transparan.

Di sisi lain, pendidikan antikorupsi harus menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Papua. Mengedukasi pejabat daerah serta masyarakat tentang pentingnya transparansi dan dampak buruk dari korupsi bagi pembangunan jangka panjang sangatlah penting. Melalui pendidikan ini, diharapkan tercipta kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, serta membangun budaya integritas yang kuat di semua lapisan masyarakat. Semua rekomendasi ini harus dilaksanakan secara terintegrasi untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Lebih lanjut, pemberitaan Kompas TV sering mengangkat pentingnya peran aktif masyarakat sipil dan media dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana publik. Dengan melibatkan masyarakat Papua dalam proses transparansi dan akuntabilitas dana otonomi khusus, diharapkan akan tercipta kontrol sosial yang lebih kuat dan efektif. Hal ini juga diperkuat dengan usulan perlunya membangun kapasitas institusi lokal, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Daerah, untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan.

Selain itu, pemberitaan juga menggarisbawahi perlunya pemerintah pusat memperkuat mekanisme check and balance dalam pengelolaan dana otonomi khusus. Salah satu rekomendasi yang sering disampaikan adalah pembentukan sistem audit real-time yang memungkinkan evaluasi secara berkala terhadap

penggunaan dana. Dengan sistem ini, penyimpangan dapat dideteksi sejak dini, sehingga mencegah korupsi terjadi dalam skala besar. Narasi ini secara implisit menegaskan bahwa tanpa reformasi birokrasi dan pengawasan yang komprehensif, upaya pemberantasan korupsi akan sulit mencapai hasil yang signifikan.

Kompas TV juga menekankan pentingnya edukasi dan kampanye antikorupsi yang lebih intensif, terutama di daerah-daerah rawan korupsi seperti Papua. Dengan mengedukasi masyarakat tentang hak mereka atas pengelolaan dana publik, diharapkan dapat tercipta budaya transparansi yang dimulai dari tingkat akar rumput. Rekomendasi ini mencerminkan pendekatan yang holistik, di mana pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Kompas TV memanfaatkan platform digitalnya untuk memperkuat framing, menampilkan visualisasi data, wawancara eksklusif, dan rekaman konferensi pers KPK terkait kasus Lukas Enembe. Dengan fokus pada dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Papua, pemberitaan ini tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memengaruhi persepsi audiens terhadap korupsi. Melalui analisis framing Entman, dapat disimpulkan bahwa Kompas TV membangun kesadaran publik tentang seriusnya isu korupsi, mendesak reformasi tata kelola pemerintahan, dan memperkuat legitimasi tindakan tegas dari penegak hukum. Media massa berperan penting dalam membingkai isu kompleks dan mendorong perubahan sosial.

b. Berita 2 (Keterangan 3 saksi soal aliran dana Rp. 1 M di sidang Kasus Korupsi Lukas Enembe)

1). *Define Problem* (pendefinisian masalah)

Dalam kasus korupsi Lukas Enembe, pemilihan narasumber juga merupakan dasar untuk memperkirakan masalah. Adapun alasan mengambil berita ini karna memiliki viewers sebanyak 956 tayangan. Dalam menentukan *define problem*, pernyataan narasumber pada berita yang dimuat di Kompas Tv



Gambar 4.8 Keterangan 3 saksi sidang kasus korupsi Lukas Enembe

Berita yang dimuat pada tanggal 21 Agustus 2023, kutipan yang mempertajam *Define problem* yang disampaikan langsung oleh Ketiga saksi yaitu Imelda Sun, pemilik sebuah salon di Jayapura, Budi Sultan Direktur PT Indo Papua, dan Sherly Susan Direktur Utama (Dirut) PT laut Timur Papua. pada detik 11:15-1:25:35 menit. Persidangan ini bertujuan untuk mendengarkan keterangan dari 3 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari KPK, selama persidangan hakim juga mengajukan pertanyaan kepada ketiga saksi terkait aliran dana sebesar Rp1 Milyar ke rekening Lukas Enembe

Baik dalam analisis maupun kutipan-kutipan yang disajikan, terlihat bagaimana Kompas TV menyusun pemberitaan yang menjadi dasar pembentukan *Define problem*. Salah satu contoh yang menonjol dari keterangan, yang memberikan penjelasan dari saksi Budi Sultan Direktur PT Indo Papua atas kasus Lukas Enembe bahwa majelis hakim dengan berbagai macam pertanyaan apakah PT Indo Papua bekerja sama dengan proyek Kabupaten atau Gubernur dan Budi Sultan menjawab dia sebagai kontraktor yang berkerjasama dengan pemerintah PU.

Faktor utama yang turut disorot adalah lemahnya pengawasan internal di dalam pemerintahan daerah Papua. Sistem pengawasan yang seharusnya mencegah praktik korupsi justru tidak berfungsi secara optimal, memungkinkan penyalahgunaan dana publik terjadi tanpa deteksi dini. Kurangnya audit yang transparan dan independen juga menjadi salah satu alasan mengapa praktik seperti ini dapat berlanjut dalam waktu yang lama. Selain itu, dugaan keterlibatan jaringan sistematis di pemerintahan lokal menunjukkan bahwa korupsi ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri. Kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain di tingkat administratif dan politik memperlihatkan kompleksitas masalah ini.

2). *Diagnose Cause* (memperkirakan penyebab masalah)

Penyebab yang diasumsikan adalah dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Lukas Enembe dalam mengelola anggaran publik di Papua. Faktor lain yang turut diduga adalah lemahnya pengawasan internal serta praktik korupsi yang melibatkan jaringan sistematis di pemerintahan lokal

Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Lukas Enembe menjadi inti permasalahan dalam kasus ini. Sebagai seorang gubernur, ia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran publik untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, kewenangan besar ini diduga telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan negara. Faktor utama yang turut disorot adalah lemahnya pengawasan internal di dalam pemerintahan daerah Papua. Sistem pengawasan yang seharusnya mencegah praktik korupsi justru tidak berfungsi secara optimal, memungkinkan penyalahgunaan dana publik terjadi tanpa deteksi dini. Kurangnya audit yang transparan dan independen juga menjadi salah satu alasan mengapa praktik seperti ini dapat berlanjut dalam waktu yang lama.

Selain itu, dugaan keterlibatan jaringan sistematis di pemerintahan lokal menunjukkan bahwa korupsi ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri. Kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain di tingkat administratif dan politik memperlihatkan kompleksitas masalah ini. Korupsi yang dilakukan secara sistematis menunjukkan adanya budaya yang toleran terhadap penyimpangan aturan, yang semakin memperburuk situasi. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi penyebab signifikan. Mekanisme laporan dan pertanggungjawaban anggaran sering kali dianggap hanya bersifat formalitas, tanpa pengawasan menyeluruh terhadap implementasi anggaran. Celah ini dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.

Konflik kepentingan dan lemahnya integritas pejabat publik juga turut memperparah situasi. Jabatan strategis yang dipegang oleh gubernur memberikan peluang untuk menggunakan sumber daya negara tanpa mekanisme kontrol yang ketat. Hal ini tidak hanya mengundang risiko korupsi, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam penyaluran bantuan atau proyek pembangunan. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan kegagalan dalam tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari lemahnya sistem pengawasan hingga budaya birokrasi yang cenderung permisif terhadap praktik korupsi. Penanganan terhadap akar penyebab ini perlu dilakukan melalui pembenahan sistem dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

3). *Make Moral Judgement* (menekankan masalah)

Tindakan yang diduga dilakukan oleh Lukas Enembe tidak hanya melanggar norma hukum yang mengatur keuangan negara tetapi juga bertentangan dengan etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pejabat publik. Sebagai seorang gubernur, ia memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam mengelola anggaran publik secara transparan dan bertanggung jawab. Dugaan keterlibatan dalam korupsi ini menunjukkan pelanggaran mendasar terhadap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Perilaku koruptif seorang pejabat tinggi dipandang sebagai ancaman serius terhadap nilai-nilai keadilan dan kepercayaan publik.

Ketika pejabat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat justru terlibat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan, hal ini merusak kredibilitas institusi pemerintahan. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakpuasan publik,

terutama di daerah seperti Papua, yang memiliki kebutuhan mendesak terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kasus ini juga memunculkan kecaman keras terhadap norma moral yang diabaikan oleh para pelaku korupsi. Dalam framing moral, tindakan ini dilihat sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Korupsi di tingkat tinggi dianggap sangat membahayakan karena dampaknya meluas tidak hanya kepada keuangan negara, tetapi juga kepada rasa keadilan masyarakat dan stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Wilayah Papua sendiri, yang masih menghadapi tantangan ekonomi seperti kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur, menjadi korban langsung dari praktik korupsi semacam ini. Dugaan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat justru diselewengkan, mencerminkan betapa besar efek negatif moral dan sosial dari kasus tersebut. Hal ini menggambarkan bagaimana tindakan tidak bermoral dari segelintir pejabat dapat memengaruhi kesejahteraan jutaan masyarakat. Pelanggaran etika publik seperti ini menegaskan perlunya integritas tinggi di kalangan pejabat daerah, terutama di wilayah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana publik. Ketika seorang pemimpin gagal memegang prinsip moral dan kepercayaan, kehancuran sistem pemerintahan serta kekecewaan masyarakat menjadi tak terelakkan. Pemberitaan semacam ini secara moral mengingatkan pentingnya tanggung jawab sebagai pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Secara keseluruhan, dugaan korupsi Lukas Enembe mencerminkan perlunya upaya untuk memperkuat norma-norma moral di dalam birokrasi, disertai

dengan penegakan hukum yang tegas. Dengan menempatkan prinsip moralitas sebagai landasan pengelolaan pemerintahan, kasus serupa dapat dicegah. Dalam konteks yang lebih luas, penanganan tegas kasus ini memberikan pesan penting bahwa pelanggaran moral, khususnya oleh pejabat publik, tidak akan ditoleransi.

4). *Treatment Recommendation* (Menekankan penyelesaian)

Solusi utama yang direkomendasikan dalam kasus ini adalah pelaksanaan proses hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap Lukas Enembe. Proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan asas praduga tak bersalah agar tetap mencerminkan keadilan. Transparansi dalam proses ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa kasus tersebut ditangani secara profesional tanpa adanya intervensi politik. Selain proses hukum, perbaikan sistem tata kelola pemerintahan menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan.

Pemerintah perlu memperkuat sistem akuntabilitas dan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran publik di semua tingkatan. Langkah ini dapat mencakup penerapan teknologi seperti sistem digital untuk pencatatan anggaran serta audit yang lebih rutin dan menyeluruh. Penguatan peran lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga sangat diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan lembaga-lembaga ini harus ditingkatkan, khususnya untuk mengawasi daerah-daerah dengan risiko korupsi yang tinggi. Dengan dukungan dan pengawasan ketat dari lembaga-lembaga tersebut, potensi penyalahgunaan anggaran di tingkat daerah dapat diminimalkan.

Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dengan penegakan hukum dan pengawasan, tetapi juga harus mencakup pendidikan antikorupsi. Pemerintah perlu memasukkan nilai-nilai antikorupsi dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Program ini harus bertujuan membangun karakter generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan menolak segala bentuk korupsi.

Langkah lain yang direkomendasikan adalah peningkatan transparansi publik melalui akses masyarakat terhadap informasi anggaran. Dengan adanya keterbukaan data dan anggaran, masyarakat dapat terlibat aktif dalam mengawasi proyek dan pengeluaran pemerintah di daerah mereka. Partisipasi publik seperti ini sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Akhirnya, solusi jangka panjang melibatkan perubahan budaya birokrasi yang selama ini cenderung permisif terhadap korupsi. Budaya birokrasi harus mengutamakan integritas, etika kerja, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Reformasi birokrasi yang lebih luas, termasuk evaluasi kinerja pejabat publik, juga diperlukan untuk memastikan bahwa posisi strategis hanya dipegang oleh individu yang kompeten dan berintegritas. Dengan pendekatan sistemik ini, diharapkan kasus-kasus serupa dapat dicegah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan.

c. Berita 3 (KPK sebut kasus Lukas Enembe berakhir tapi Negara bisa tuntutan ganti rugi)

1). *Define Problem* (pendefinisian masalah)

Dalam kasus korupsi Lukas Enembe, pemilihan narasumber juga merupakan dasar untuk memperkirakan masalah. Adapun alasan mengambil berita ini karna memiliki viewers sebanyak 18.335 tayangan. Dalam menentukan *define problem*, pernyataan narasumber pada berita yang dimuat di Kompas TV



Gambar 4.9 kasus Lukas Enembe berakhir tapi negara bisa tuntutan ganti rugi

Berita yang dimuat pada tanggal 27 Desember 2023, pada detik ke-0:07 hingga 3:09 menit. Dalam laporan pemberitaan, visualisasi yang memperlihatkan Lukas Enembe menggunakan kursi roda menjadi elemen penting dalam membangun narasi. Kondisi fisiknya yang terlihat lemah seolah mengundang empati publik dan memberikan dimensi personal dalam kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyoroti aspek hukum, tetapi juga menghadirkan sisi kemanusiaan dari seorang tersangka, yang mungkin memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut. Penggunaan kursi roda

dalam pemberitaan ini juga dapat dianggap sebagai simbol keterbatasan atau kelemahan individu di tengah proses hukum yang keras, yang pada akhirnya menambahkan lapisan kompleksitas pada interpretasi publik terhadap kasus ini.

Selain itu, kasus Lukas Enembe merefleksikan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Papua, sebagai wilayah yang memiliki potensi anggaran besar untuk pembangunan, sering kali menjadi sorotan terkait penyalahgunaan dana publik. Penutupan kasus ini, meskipun memberikan rasa keadilan secara formal, tetap meninggalkan pertanyaan besar terkait efektivitas sistem pencegahan korupsi, mekanisme kontrol anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah dan pusat.

Secara lebih luas, kasus ini juga menjadi refleksi bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Ketika seorang pemimpin daerah yang memiliki kekuasaan besar terbukti terlibat dalam korupsi, implikasinya tidak hanya terhadap kerugian negara, tetapi juga terhadap moral dan kepercayaan publik terhadap para pemimpin daerah lainnya. Oleh karena itu, meskipun kasus hukum ini telah selesai, aspek-aspek seperti upaya pemulihan kerugian negara dan reformasi sistem birokrasi tetap menjadi tugas yang belum selesai dan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

2). *Diagnose Cause* (memperkirakan penyebab masalah)

Penyebab utama masalah dalam kasus ini adalah dugaan korupsi yang melibatkan Lukas Enembe selama masa jabatannya sebagai Gubernur Papua. Dugaan ini mencakup penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan, sehingga menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Kasus

ini mencerminkan bagaimana kekuasaan yang besar di tangan seorang kepala daerah dapat disalahgunakan ketika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Kelemahan dalam pengawasan internal maupun eksternal memungkinkan terjadinya penyimpangan yang sistematis, terutama dalam tata kelola pemerintahan daerah yang mengelola anggaran besar, seperti di Papua.

Situasi ini juga mengungkapkan masalah mendasar dalam struktur birokrasi daerah yang sering kali rentan terhadap praktik korupsi. Tingginya alokasi dana pembangunan di Papua, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, justru menjadi celah untuk praktik penyimpangan akibat lemahnya akuntabilitas. Pengawasan dari pemerintah pusat, yang seharusnya menjadi kontrol atas penggunaan dana otonomi khusus dan anggaran lainnya, tampaknya tidak berjalan optimal, sehingga memberikan ruang bagi pelanggaran hukum.

Selain itu, faktor budaya birokrasi yang kerap mengutamakan loyalitas terhadap pemimpin dibandingkan prinsip transparansi dan integritas turut memperburuk situasi ini. Dalam banyak kasus, lingkungan yang tidak mendukung whistle-blowing dan lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal memperkuat pola penyimpangan yang berulang. Pada akhirnya, penyebab ini tidak hanya terletak pada individu yang berkuasa, tetapi juga pada sistem yang gagal memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, kasus ini menjadi bukti nyata bahwa korupsi di tingkat daerah tidak hanya sekadar persoalan individu, tetapi merupakan masalah struktural yang memerlukan

pembenahan mendalam pada sistem pengawasan, birokrasi, dan mekanisme distribusi anggaran untuk mencegah pengulangan kasus serupa di masa depan.

3.) *Make Moral Judgement* (menekankan masalah)

Tindakan korupsi yang diduga dilakukan oleh Lukas Enembe tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi pelanggaran moral yang serius. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik, khususnya dalam konteks Papua yang memerlukan alokasi anggaran besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menyalahgunakan dana publik, para pelaku korupsi, termasuk pemimpin daerah seperti Lukas Enembe, secara langsung merampas hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan, infrastruktur, dan pembangunan yang layak. Dampak dari tindakan semacam ini sangat terasa, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi, di mana anggaran publik seharusnya menjadi harapan bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Secara moral, tindakan korupsi tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Kasus ini mencerminkan kegagalan moral seorang pemimpin yang diharapkan menjadi teladan integritas dan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat Papua, yang selama ini berjuang menghadapi berbagai tantangan pembangunan, pada akhirnya menjadi korban utama dari penyalahgunaan wewenang ini.

Di sisi lain, visual Lukas Enembe yang menggunakan kursi roda selama menjalani proses hukum menimbulkan perdebatan moral yang cukup kompleks. Di satu sisi, sistem hukum harus menunjukkan kemanusiaan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka dalam setiap tahap penanganan kasus, termasuk

memberikan perlakuan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia. Namun, di sisi lain, penggunaan kursi roda juga dapat memunculkan persepsi publik tentang upaya untuk menarik simpati atau meringankan proses hukum melalui penggambaran kondisi fisik yang rentan. Hal ini menimbulkan dilema moral: bagaimana memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa diskriminasi, tetapi juga tanpa memberikan ruang untuk manipulasi kondisi yang dapat mengganggu proses keadilan.

Secara keseluruhan, kasus ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga membuka wacana moral yang lebih luas. Bagaimana masyarakat, institusi hukum, dan media memandang dan memperlakukan tersangka dengan kondisi tertentu menjadi refleksi terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan integritas yang dijunjung dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

4). *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian)

Solusi yang diajukan mencakup tuntutan ganti rugi negara atas kerugian akibat korupsi, serta perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, proses hukum yang transparan dan berkeadilan tetap harus dijalankan tanpa mengesampingkan hak-hak tersangka. Solusi yang diajukan mencakup beberapa langkah strategis untuk mengatasi korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pertama, pemerintah perlu menetapkan mekanisme yang jelas untuk menuntut ganti rugi dari individu atau kelompok yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ganti rugi ini harus mencakup seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan kekuasaan atau penggelapan dana negara.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem penelusuran aset untuk memastikan bahwa hasil korupsi dapat dikembalikan ke kas negara.

Kedua, pengawasan dalam tata kelola pemerintahan harus diperkuat dengan memperkuat lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat, BPKP, dan KPK. Pengawasan berbasis teknologi, seperti sistem informasi yang transparan dan mudah diakses oleh publik, juga perlu dikembangkan untuk memudahkan pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Teknologi ini juga dapat membantu memastikan proyek pemerintah dan pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi.

Ketiga, proses hukum terhadap tersangka korupsi harus dilakukan dengan transparansi agar publik dapat mengawasi jalannya peradilan. Selain itu, penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga independen yang memastikan bahwa semua proses hukum dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan.

Keempat, meskipun proses hukum berjalan, hak-hak tersangka harus tetap dilindungi. Tersangka harus diberi hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang adil, dan proses penyidikan serta penuntutan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Ini akan memastikan bahwa sistem peradilan tetap berfungsi dengan integritas dan keadilan.

Kelima, untuk mencegah tindak pidana korupsi sejak dini, edukasi dan sosialisasi mengenai nilai-nilai integritas, anti-korupsi, dan etika pemerintahan perlu dilakukan secara berkala kepada semua aparatur pemerintahan. Selain itu,

reformasi birokrasi yang fokus pada peningkatan efisiensi dan integritas ASN juga penting. Penerapan sistem rekrutmen yang lebih ketat, serta penilaian kinerja yang objektif dan transparan, menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta menanggulangi korupsi secara lebih efektif.

Berita ini menunjukkan bahwa meskipun kasus hukum Lukas Enembe telah dinyatakan selesai, penegakan hukum yang adil tetap menjadi sorotan utama. KPK berupaya memberikan pesan bahwa negara tidak boleh abai terhadap kerugian akibat korupsi. Di sisi lain, narasi tentang kondisi fisik Lukas Enembe menggarisbawahi pentingnya pendekatan humanis dalam proses hukum, tanpa mengurangi keadilan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan tata kelola pemerintahan harus diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.

d. Berita 4 (Awal karir Lukas Enembe dan sekelumit kasus hukum yang menjeratnya)

1). *Define Problem* (pendefinisian masalah)

Dalam pemberitaan ini, kasus korupsi Lukas Enembe dibingkai sebagai persoalan serius yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik. Fokus utama adalah bagaimana Lukas Enembe, sebagai kepala daerah, diduga melakukan pelanggaran hukum melalui tindakan korupsi yang merugikan negara.



Awal Karir Lukas Enembe dan Sekelumit Kasus Hukum yang Menjeratnya

Gambar

4.10 Awal karir Lukas Enembe dan kasus hukumnya

Berita yang muat pada tanggal 26 Desember 2023 pada menit 2.11-4.50 berita di pilih oleh penulis karena viewers video yang tinggi sebanyak 2.101 tayangan. Dapat dilihat Kasus korupsi yang melibatkan Lukas Enembe, seorang kepala daerah, mencuat sebagai persoalan serius yang mengancam integritas sistem pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Dalam pemberitaan ini, kasus tersebut dibingkai sebagai contoh nyata penyalahgunaan jabatan publik oleh seorang pejabat tinggi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya negara untuk kesejahteraan masyarakat. Fokus utama dari kasus ini adalah dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Enembe, yang tidak hanya melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah, tetapi juga mencakup praktik-praktik penyuapan, gratifikasi, dan peruntukan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Mengacu pada tindak pidana yang di jatuhkan kepada Lukas Enembe meskipun Lukas Enembe tidak sopan pada sidang pidananya, dimana hukum tetap jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pangaanti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kasus ini juga memunculkan kecaman keras terhadap norma moral yang diabaikan oleh para pelaku korupsi. Dalam framing moral, tindakan ini dilihat sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Korupsi yang tinggi dianggap sangat membahayakan karena dampaknya meluas tidak hanya kepada keuangan negara, tetapi juga kepada rasa keadilan masyarakat dan stabilitas sosial di wilayah tersebut.

2). *Diagnoses Cause* (memperkirahkan penyebab masalah)

Penyebab masalah dikaitkan dengan praktik tata kelola pemerintahan yang buruk dan lemahnya pengawasan terhadap pejabat publik. Kompas TV kemungkinan menyoroti bagaimana sistem birokrasi atau celah hukum dimanfaatkan oleh Lukas Enembe untuk melakukan tindakan korupsi. Penyebab utama dari kasus korupsi yang melibatkan Lukas Enembe dapat dikaitkan dengan praktik tata kelola pemerintahan yang buruk dan lemahnya sistem pengawasan terhadap pejabat publik. Salah satu faktor yang memperburuk situasi adalah adanya celah dalam birokrasi dan sistem hukum yang dimanfaatkan oleh Lukas Enembe untuk melakukan tindakan korupsi. Kompas TV, dalam pemberitaannya, kemungkinan menyoroti bagaimana birokrasi yang tidak efisien, minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, serta sistem pengawasan yang

lemah, memberikan ruang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Sistem hukum yang tidak tegas dan proses administrasi yang terlalu kompleks juga turut memberikan peluang bagi pelaku korupsi untuk melakukan tindakan yang merugikan negara. Praktik korupsi ini semakin dipermudah dengan lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Selain itu, kurangnya budaya integritas dan disiplin di kalangan aparatur negara, serta ketidakberdayaan masyarakat dalam melakukan pengawasan atau melaporkan penyalahgunaan kekuasaan, semakin memperburuk situasi.

Praktik penyalahgunaan jabatan seperti ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang semestinya melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pengawas internal, seperti Inspektorat, hingga lembaga independen seperti KPK. Tanpa adanya mekanisme yang jelas dan efektif dalam memonitor dan mengevaluasi kebijakan serta pengelolaan anggaran, celah hukum yang ada dapat dimanfaatkan oleh pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara dan masyarakat luas.

3). *Make moral judgement* (menekankan masalah)

Dalam pemberitaan ini, kasus korupsi yang melibatkan Lukas Enembe diberi penilaian moral yang sangat negatif, mengingat posisi Enembe sebagai seorang tokoh publik yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat. Tindakannya yang diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat sebagai pemilih dan

sebagai pihak yang mempercayakan tanggung jawab kepadanya untuk mengelola sumber daya daerah demi kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, Lukas Enembe diposisikan sebagai individu yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin publik, seperti integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap kesejahteraan publik.

Pemberitaan ini secara tegas menguatkan nilai-nilai penting yang harus dijunjung tinggi dalam jabatan publik, yakni integritas dan akuntabilitas. Integritas mengharuskan pejabat publik untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, sementara akuntabilitas menuntut agar setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan jelas kepada publik. Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan jabatan dapat berakibat fatal, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menjadi korban dari tindakan korupsi tersebut.

Dalam perspektif moral, tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan negara dalam bentuk kerugian finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, pemberitaan ini mendorong perlunya pembenahan sistem tata kelola pemerintahan dan penguatan budaya integritas di kalangan pejabat publik, agar kasus serupa tidak terulang dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan.

4). *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian)

Solusi yang ditawarkan dalam menghadapi kasus korupsi yang melibatkan Lukas Enembe dan pejabat lainnya adalah penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kerugian negara dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum yang jelas dan adil akan memberikan pesan yang kuat kepada publik bahwa tidak ada individu, apapun posisi dan kekuasaannya, yang kebal dari hukum. Hal ini akan menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sistem peradilan.

Selain itu, dalam pemberitaan ini, Kompas TV kemungkinan menyerukan perlunya reformasi mendalam dalam sistem pengawasan pemerintahan guna mencegah kasus serupa di masa depan. Salah satu langkah penting adalah memperkuat lembaga-lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal, dengan memberikan wewenang yang lebih besar dan dukungan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas dan independensi KPK, BPK, serta lembaga pengawasan internal lainnya yang berperan untuk memastikan bahwa anggaran dan kebijakan publik dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Reformasi juga harus mencakup penerapan sistem teknologi yang lebih canggih dalam proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, seperti penggunaan e-procurement dan sistem pelaporan keuangan

yang dapat diakses secara real-time oleh publik. Ini akan mempermudah proses monitoring dan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan anggaran, serta meminimalisir celah yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat publik untuk melakukan korupsi.

Selain itu, penting untuk mendorong pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparatur negara, guna menumbuhkan budaya integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip anti-korupsi. Pemberian insentif bagi pejabat publik yang memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas juga bisa menjadi langkah pencegahan yang efektif.

e. Berita 5 (Lukas Enembe meninggal, KPK sebut pertanggung jawaban pidanya berakhir)

1). *Define problem* (pendefinisian masalah)

Dalam kasus korupsi Lukas Enembe, pemilihan narasumber juga merupakan dasar untuk memperkirakan masalah. Dalam menentukan *Define Problem*, pernyataan narasumber pada berita yang dimuat pada Kompas TV dengan judul “Lukas Enembe meninggal, KPK sebut pertanggungjawaban pidananya berakhir”



Gambar 4.11 Lukas Enembe meninggal

“dengan meninggalnya terdakwa, maka secara hukum pertanggungjawaban pidana berakhir tetapi dalam konteks perkara tipikor”

Diketahui bahwa Lukas Enembe meninggal dunia setelah sebelumnya divonis menderita gagal ginjal. Politikus dari Partai Demokrat tersebut juga dikabarkan mengalami serangan jantung sebelum meninggal dunia. Baik melalui diskursus keseluruhan maupun melalui kutipan-kutipan yang ditampilkan, terlihat bagaimana Kompas TV menyusun pemberitaan yang menjadi dasar pembentukan framing atas peristiwa tersebut. Penyusunan berita dilakukan dengan pendekatan yang menyajikan informasi medis dan hukum secara berimbang, serta tetap mempertahankan prinsip objektivitas. Framing yang dibangun tidak hanya menggambarkan kondisi kesehatan Lukas Enembe menjelang akhir hayatnya, tetapi juga tetap mengaitkan konteks hukum yang sedang dijalaninya saat itu.

2). *Diagnoses Cause* (memperkirahkan penyebab masalah)

Penyebab utama yang diangkat dalam kasus ini adalah lemahnya integritas dalam kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya publik, yang berujung pada terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kasus korupsi yang melibatkan Lukas

Enembe sering kali dianggap sebagai gejala dari permasalahan struktural dalam sistem pemerintahan yang kurang transparan dan akuntabel, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran di Papua. Ketidakmampuan untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara tepat dan bertanggung jawab menciptakan celah bagi tindakan korupsi oleh oknum pejabat yang memiliki akses terhadap sumber daya negara.

Lemahnya integritas kepemimpinan sering kali dikaitkan dengan tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen dalam pengelolaan dana publik, khususnya dana otonomi khusus yang diberikan kepada Papua. Celah ini semakin diperburuk oleh birokrasi yang rentan terhadap pengaruh politik dan kurangnya budaya integritas di kalangan pejabat publik. Ketergantungan pada individu-individu tertentu dalam pengelolaan sumber daya juga memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya checks and balances yang memadai.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya pemberdayaan masyarakat dan minimnya partisipasi publik dalam mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-hak mereka dan bagaimana dana publik seharusnya dikelola membuka peluang bagi praktik korupsi untuk berlangsung dalam skala besar tanpa terdeteksi. Selain itu, kompleksitas dan luasnya wilayah Papua sering kali menjadi tantangan dalam melakukan pengawasan yang efektif, terutama di daerah-daerah terpencil.

Kasus ini mencerminkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi karena keserakahan individu, tetapi juga karena kelemahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan yang tidak mampu membangun budaya transparansi dan

akuntabilitas. Oleh karena itu, diagnosis penyebab kasus ini menegaskan perlunya reformasi mendalam dalam sistem pengelolaan anggaran, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penguatan nilai-nilai integritas di semua tingkatan pemerintahan, agar praktik korupsi semacam ini dapat dicegah di masa mendatang.

3). *Make Moral Judgement* (menekankan masalah)

Dalam pemberitaan ini, Lukas Enembe dinilai secara moral sebagai seorang pejabat publik yang gagal memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Tindakannya yang diduga terlibat dalam korupsi mencerminkan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan kepemimpinan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menjalankan jabatan publik. Kasus ini dijadikan sebagai contoh nyata tentang dampak buruk dari hilangnya transparansi dan etika dalam pemerintahan, yang tidak hanya merugikan negara secara materiil tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Pemberitaan ini juga memperkuat pentingnya penegakan nilai-nilai integritas, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam tata kelola pemerintahan. Lukas Enembe, yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat sebagai pemimpin daerah, justru dianggap melanggar prinsip-prinsip tersebut. Hal ini memberikan pelajaran penting bahwa jabatan publik bukanlah sarana untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi demi kepentingan rakyat.

Namun, pemberitaan ini juga menyoroti respons masyarakat terhadap meninggalnya Lukas Enembe, yang memberikan dimensi kemanusiaan pada isu ini.

Banyak pihak yang memandang kematiannya sebagai akhir yang tragis bagi seorang pemimpin yang pernah memiliki pengaruh besar di daerahnya. Di sisi lain, muncul beragam reaksi emosional, baik dari mereka yang merasa kecewa atas dugaan tindakannya maupun dari pihak yang tetap menghormatinya sebagai figur publik yang memiliki kontribusi dalam pembangunan Papua. Respons ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam cara masyarakat memandang pemimpin, di mana kesalahan seorang pejabat tidak selalu menghapus semua jasa atau kontribusi yang pernah diberikan.

Penilaian moral yang muncul dari pemberitaan ini juga mencakup pengingat bahwa kasus korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial, khususnya di wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan pembangunan seperti Papua. Dengan demikian, pemberitaan ini mengajak masyarakat untuk merenungkan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan mendorong reformasi sistemik dalam tata kelola pemerintahan guna mencegah kasus serupa di masa depan.

4). *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian)

Rekomendasi yang diangkat dalam pemberitaan ini mencakup perlunya penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih, bahkan setelah kasus besar seperti yang melibatkan Lukas Enembe dinyatakan selesai. Penegakan hukum yang transparan, adil, dan menyeluruh harus terus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak korupsi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, proses hukum yang dijalankan harus

memastikan bahwa aset-aset negara yang dirugikan akibat korupsi dapat dipulihkan dan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat.

Rekomendasi lainnya adalah memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan dalam tata kelola pemerintahan, terutama di wilayah-wilayah dengan pengelolaan anggaran besar seperti Papua. Pengawasan yang lebih ketat dan independen diperlukan untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk melakukan penyalahgunaan anggaran. Langkah ini bisa melibatkan pengembangan sistem digitalisasi anggaran yang transparan, yang memungkinkan masyarakat luas, media, dan lembaga pengawas untuk memantau penggunaan anggaran secara real-time.

Selain penguatan pengawasan, diperlukan juga reformasi struktural dalam birokrasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur pemerintahan melalui pelatihan antikorupsi, sertifikasi etika kerja, dan mekanisme audit berkala. Reformasi ini juga harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengawasan dan pelaporan apabila ditemukan dugaan penyimpangan anggaran.

Terakhir, rekomendasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani korupsi. Hanya dengan kerja sama yang terintegrasi, kasus-kasus korupsi yang merugikan negara seperti ini dapat diminimalkan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif, terutama di daerah-daerah yang sangat membutuhkan perhatian seperti Papua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai pemberitaan terkait pemrosesan kasus Gubernur Papua, Lukas Enembe, di media online Kompas TV pada periode Mei hingga Desember 2023, terlihat bahwa media ini menjalankan peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik secara faktual dan berimbang. Melalui pendekatan analisis framing dari Robert Entman, dapat diamati bagaimana Kompas TV membangun narasi, memilih sudut pandang, serta mengonstruksi realitas terkait kasus korupsi tersebut.

Kompas TV tampak berupaya untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip etika jurnalistik, seperti akurasi, keberimbangan, dan netralitas, dengan menghindari campur tangan opini yang dapat memengaruhi persepsi publik. Hal ini menunjukkan bahwa media tersebut menjalankan tanggung jawabnya sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya.

Seleksi isu yang dikonstruksi dalam pemberitaan Kompas TV berfokus pada proses hukum terhadap Lukas Enembe, mulai dari penetapan sebagai tersangka hingga proses persidangan. Pemberitaan juga menekankan pada jumlah nilai korupsi serta bentuk korupsi yang dilakukan oleh Lukas Enembe. Dalam aspek penonjolan, Kompas TV cenderung menampilkan narasumber sebagai penguat atas fakta-fakta yang diberitakan, sehingga memberikan legitimasi terhadap isi berita.

Pemberitaan ini dirancang untuk tidak hanya menyampaikan informasi faktual, tetapi juga membangun narasi yang memengaruhi persepsi publik terhadap kasus tersebut. Berdasarkan analisis *framing* Robert N. Entman terhadap pemberitaan kasus korupsi Lukas Enembe di akun YouTube Kompas TV, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Define problems*, Kompas TV mengidentifikasi korupsi ini sebagai simbol kegagalan tata kelola pemerintahan di Papua, menyoroti dampak negatifnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2. *Diagnose causes*, pemberitaan menekankan lemahnya pengawasan keuangan, kurangnya transparansi birokrasi, serta potensi kolusi sistemik sebagai penyebab utama.
3. *Moral judgement*, Kompas TV memberikan penilaian kritis terhadap Lukas Enembe, memosisikannya sebagai tokoh yang mengkhianati mandat rakyat, dan adanya sikap yang tidak sopan ketika di persidangan dimana Lukas Enembe sempat teriak tidak menerima apa yang di katakan jaksa sekaligus menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat Papua.
4. *Treatment recommendation*, Kompas TV mengedepankan pentingnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum serta sistem pengawasan, serta reformasi tata kelola dana otonomi khusus untuk mencegah pengulangan kasus serupa di masa depan.

Dengan pendekatan ini, Kompas TV tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen yang mendorong reformasi dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya akuntabilitas dalam

pemerintahan. Analisis *framing* ini menunjukkan bagaimana media dapat memengaruhi opini publik dan menciptakan tekanan sosial yang mendukung penegakan keadilan dan bagaimana media dapat memengaruhi opini publik dan menciptakan tekanan sosial yang mendukung penegakan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran kepada para peneliti selanjutnya. Pemerintah dan lembaga terkait disarankan untuk menggunakan hasil analisis *framing* ini sebagai masukan dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan dana otonomi khusus. Penegakan hukum yang tegas harus diiringi dengan pembenahan sistemik untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Sementara itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh *framing* media terhadap perubahan opini publik dan dampaknya pada pengambilan keputusan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari Ahditia Puji, *Analisis Wacana Pemberitaan Pro Kontra Pemidanaan Pelaku Nikah Siri di Harian Seputar Indonesia*, Edisi Februari 2010
- Ali Akbar, “Efektifitas Youtube sebagai media penyebaran Informasi” Skripsi, UIN AR Raniry, Banda Aceh, 2018
- Hakim Astqolani Aziz, “Nilai Berita Dan Etika Media Tinjauan Teori Ekonomi dan Politik Media-Mosco. Analisis Teks Pemberitaan Perampokan dan Penyanderaan Di Pondok Indah Jakarta 3 September 2016 Di Kompas Tv, 2017
- Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan politik Media* Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Hamka, “*Tafsir AL-Azhar Juz I*”, Jakarta: Panji Masyarakat, 1965
- Hasanah Ulfatun, “Analisis penggunaan gaya Bahasa sarkasme netizen di media sosial Instagram”, jurnal Universitas Muhammadiyah makassar, jln.sultan alauddin makassar, vol 7, No.2, 2021
- Hastarjo Sri, *New Media: Teori dan Aplikasi*, Karanganyar: Lindu Pustaka, 2011
- Herwibowo Yudhi, “Youtube”
<http://repo.iaintulungagung.ac.id/17432/5/BAB%2011.pdf> Agustus 9 2023
- Febry Ichwan Butsi, “Mengenali Analisis Framing; Sejarah dan Metodologi”, Jurnal Ilmiah Komunikasi Communique, Vol.1, No, 2 2019
- Lexy J.Moleong *Metode penelitian kualitatif*, Cet.VIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Hadya Jayani Dwi, “media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia,” 26 Februari 2020
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia/> Agustus 9 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata Bingkai-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

- Rahma Kriyantoro t, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2006).
- Renda. Lestari, (tt.), “*Penggunaan YouTube sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris*”. Makalah Seminar Nasional Kedua Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurnal pendidikan, hal. 609 /Agustus 9 2023
- Avis Lisdiana “*Dampak Dan Perkembangan Media Baru Di Era Globalisasi Komunikasi Indonesia*” November 28 2013,
http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/33951/1/14210060_BAB%20I%20_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf,agustus 8 2023
- Anton Maburki KN Anton, *Produksi Program TV Non-Drama*, Gramedia:2018
- Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987
- Faizatu Mubarakah, Nur Faizatul, “*Analisis Framing Robert N. Entman terhadap berita kontra radikalisme pada akun Youtube NU Channel*”, UIN Sunan: Ampel Surabaya, 2021
- Ruli Nasrullah, *Media Sosial: “Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi”*, Bandung: Simbiosis Media,2015
- Mubarakah Nur Faizatul, “*Analisis Framing Robert N. Entman terhadap berita kontra radikalisme pada akun Youtube NU Channel*”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021
- FeronitaNuraini, “*Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Setya Novanto di Media Online Kompas,Com*”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019
- Hopy Nurjayanti, “*Analisis Penggunaan Singkatan Pada Judul Berita di Harian Jawa Po*” Edisi Oktober-November 2013
- Romeltea, “*Media Baru Pengertian Dan Jenis-Jenisnya*,”Mei 2 2019,
<https://romeltea.com/media-baru-pengertian-dan-jenis-jenisnya/> Agustus 8 2023
- Septiawa Santana K n., *Menulis Feature*, Pustaka Bani Quraisy: 2005
- Malthuf Siroj, “*Korupsi dalam Perpektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya*” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11.2 (2017), 293–312 <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.1038>>

Sobur Alex, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik Dan Analisis Framing*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012

Suri Dharlinda, “Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi Dalam Perwujudan Pembangunan Nasional” *Komunikasi Pembangunan*, Vol.17 No.2, 2019, hlm.2, Agustus 8 2023

<http://repository.uinsu.ac.id/15999/2/BAB%20I%20%281%29.pdf>, Jurnal

Suryawati Indah, *Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia:2011

Syamsul Asep, M Romli. *Jurnalistik Online*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2017

Wahuni Willa, “fakta kasus korupsi gubernur papua Lukas Enembe,” Januari 11 2023,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/fakta-kasus-korupsi-gubernur-papua-lukas-enembe-lt63be7fd194e5a/> Agustus 8 2023

Wilson Andrea, “YouTube in The”, i

<http://repo.iaintulungagung.ac.id/17432/5/BAB%20II.pdf> Agustus 9 2023

Zawawi Zulfitra Muhammad, “Analisis Framing Pemberitaan Korupsi Petinggi Organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Media Tempo.Co dan Liputan 6.Com” Universitas Putra Batam, 2023

L

A

M

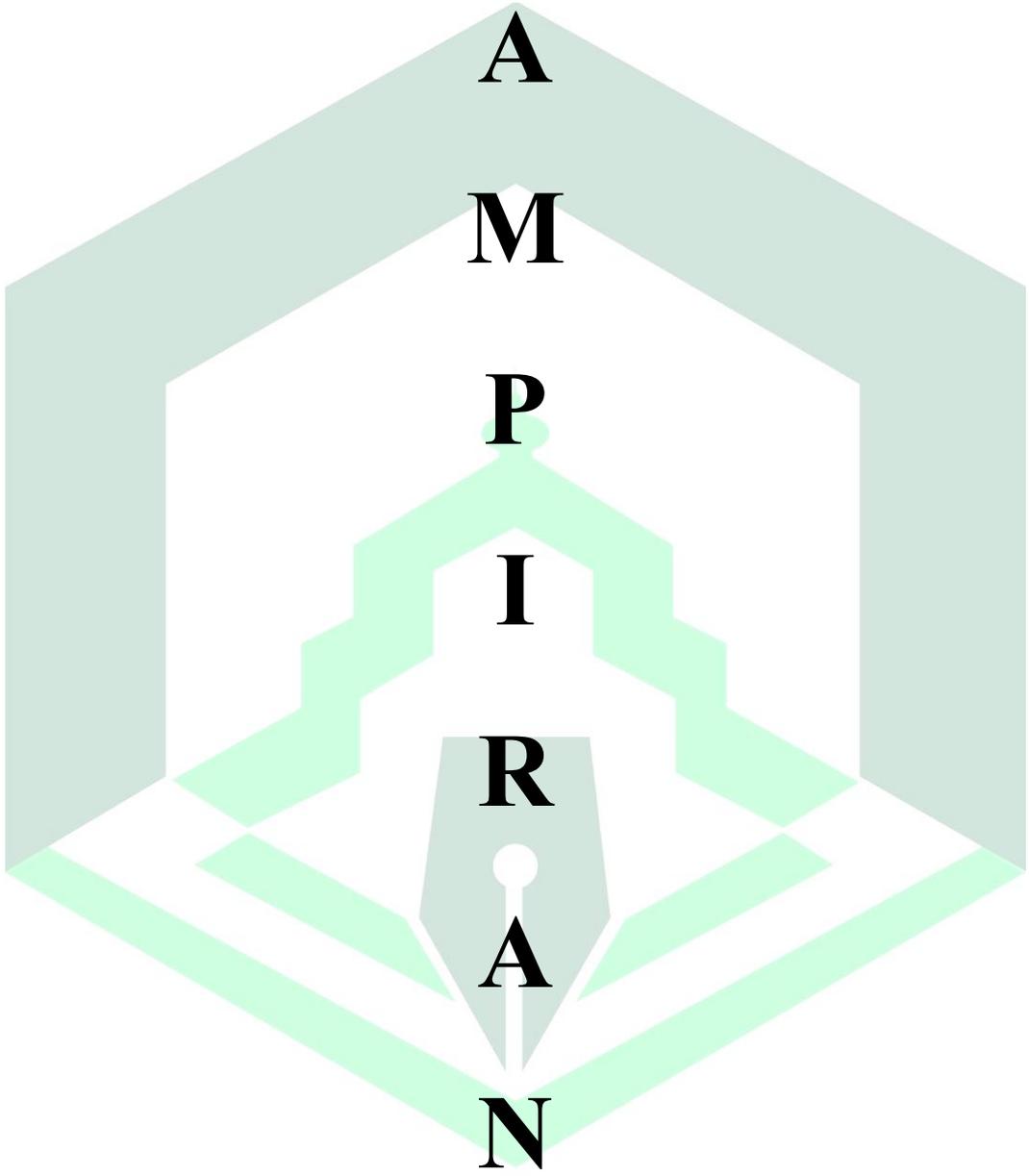
P

I

R

A

N



Narasumber Bapak Jokowi



Narasumber Agus Harimukti Yudhoyono



Keterangan 3 saksi sidang kasus korupsi LukasEnembe



kasus Lukas Enembe berakhir tapi negara bisa tuntutan ganti rugi



Awal karir Lukas Enembe dan kasus hukumnya



Awal Karir Lukas Enembe dan Sekelimit Kasus Hukum yang Menjeratnya

Lukas Enembe meninggal



RIWAYAT HIDUP



Nadya Dwi Hasta, lahir di Balutan pada tanggal 05 April 2001. Penulis merupakan anak ke Dua dari Tiga bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Hamzah dan ibu Itang. Saat ini, penulis bertempat tinggal di jalan Sawerigading kelurahan Noling kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 550 Bilante, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN Satap Bilante hingga tahun 2015. Pada tahun yang sama pula penulis menempuh pendidikan di SMAN 4 Luwu dan lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan yang ditekuni yaitu pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) palopo.